

# G30S dan Asia

## DALAM BAYANG-BAYANG PERANG DINGIN

Editor: Kurasawa Aiko dan Matsumura Toshio

#### Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



## TIONGKOK DAN G30S<sup>1</sup>

Taomo Zhou<sup>2</sup>

### Pengantar

Sampai kini masih banyak hal yang belum jelas mengenai Peran Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam pusaran politik Indonesia pada saat dan ketika Peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) terjadi. Gagasan bahkan tuduhan akan adanya tangan Beijing dalam peristiwa itu sudah hadir sejak akhir 1965 ketika Angkatan Darat Indonesia menuduh pemerintah Tiongkok telah menyelundupkan senjata untuk diberikan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bertujuan mengadakan pemberontakan.<sup>3</sup> Koran Angkatan Darat, *Angkatan Bersenjata*, kemudian melancarkan serangan terhadap G30S dengan memberinya cap sebagai "kup gagal komunis, direncanakan dan diatur rezim Peking

<sup>1</sup> Diterjemahkan oleh A. Dahana, Guru Besar Studi Cina, Universitas Indonesia.

<sup>2</sup> Penulis mengucapkan terima kasih kepada Chen Jian, Jack Meng-tat Chia, Sherman Cochran, Charles Kraus, Andrew Mertha, Eric Tagliacozzo dan para peninjau anonim untuk komentar mereka. Juga kepada Jeffery Petersen serta Carole Atkinson untuk bantuan mereka dalam mencari materi.

<sup>3</sup> "262 Putjuk Senjata Dapat Dirampas." *Duta Masyarakat*, 11 Oktober 1965. Menurut laporan ini, dari 262 pucuk senjata yang dapat dirampas dalam minggu pertama operasi militer terhadap PKI, 152 di antaranya dari jenis Tjung.

sebagai salah satu bagian dari konsep revolusi dunia."<sup>4</sup> Tuduhan itu ditanamkan di dalam pikiran rakyat Indonesia antara lain melalui film berjudul *Pengkhianatan G30S/PKI*. Film itu merupakan alat propaganda pemerintah Soeharto yang ditayangkan selama 13 tahun setiap tanggal 30 September malam dan wajib ditonton anak-anak sekolah. Di dalam film itu digambarkan bagaimana para dokter Tiongkok mempraktikkan akupunktur dengan getaran listrik terhadap presiden yang sedang sakit. Kemudian digambarkan pula tentang bagaimana diagnosis mengenai kondisi kesehatan Soekarno sebagai "sangat berbahaya dan kritis" itu dipresentasikan sebagai pemicu "percobaan kup" PKI.<sup>5</sup> Dalam dunia bacaan berbahasa Inggris, beberapa penulis seperti Victor Vic, Jun Chang, dan Jon Halliday telah mengetengahkan spekulasi yang mengklaim bahwa Mao Zedong telah memerintahkan PKI untuk melancarkan gerakan itu.<sup>6</sup> Namun, tidak ada satu pun dari tuduhan yang dikatakan di atas disampaikan atas dasar bukti yang dapat dipercaya. Pengetahuan kita tidak lengkap karena selama ini tidak ada sumber dari pihak RRT yang berhubungan dengan peristiwa itu.

Artikel ini dimaksudkan untuk mencoba mengklarifikasi peran pemerintah Tiongkok selama masa itu di Indonesia dengan cara membaca materi berupa kumpulan arsip koleksi Kementerian Luar Negeri RRT. Argumentasi penulis, memang merupakan fakta bahwa Tiongkok telah "menanam saham" dalam perpolitikan di Indonesia. Akan tetapi, pengaruh RRT yang sebenarnya terhadap PKI dan perubahan politik di Indonesia pada 1965 tidak sebesar seperti yang digambarkan



D.N. Aidit (Ketua PKI), Mao Zedong, Tanti Aidit (istri Aidit), anggota Politbiro PKI Yusuf Adjitorop, berfoto bersama pada 5 Agustus 1965. Koleksi Institute of International Social History, Amsterdam.

4 "Kisah Gagalnya Gestapu yang Dimasak di Peking, I: Rezim Peking perintahkan bunuh? Djenderal & Semua Perwira 'Reaksioner'; RRT sanggup pengiriman senjata & perlengkapan sendjatanya untuk 30.000 orang," *Angkatan Bersendjata*, 25 April 1966.

5 Pengkhianatan G30/PKI, disutradarai oleh Arifin C. Noer, 1964.

6 Victor M. Vic, *Anatomy of the Jakarta Coup, October 1, 1965* (New Delhi: Abhinav Publication); Jung Chang and John Halliday, *Mao: The Unknown Story* (New York, NY: Anchor Book, 2005), hlm. 487-489.

pemerintah Soeharto dan buku-buku yang disebutkan di atas tadi. Yang paling utama, artikel ini akan menyetengahkan bukti baru yang memperkuat dugaan bahwa D. N. Aidit merupakan orang yang secara sadar terlibat dalam G30S. Dalam pertemuannya dengan Mao Zedong pada 5 Agustus 1965, Aidit menggambarkan dengan rinci rencana untuk melaksanakan gerakan tersebut.<sup>7</sup> Dalam hal ini, John Roosa dalam karyanya *Pretext for Mass Murder* mengajukan pendapat, Aidit punya alasan bagus untuk memilih G30S sebagai strategi untuk mengatasi keadaan yang dihadapinya. Namun, buku itu tidak menyertakan bukti kuat yang bertalian dengan peran yang dimainkan ketua PKI itu.<sup>8</sup> Satu-satunya kumpulan dokumen RRT yang mencatat diskusi antara Aidit dengan Mao telah mengubah secara fundamental tentang bagaimana kita mengerti tentang peristiwa G30S.

Bagian utama dari bukti berupa arsip yang digunakan sebagai dasar argumentasi yang dikemukakan dalam artikel ini diperoleh selama masa pendek adanya akses luar biasa atas dokumen-dokumen tersebut. Di Tiongkok G30S telah menjadi topik yang menjadi sasaran sensor pemerintah. Beijing telah membatasi akses terhadap dokumen milik pemerintah yang berhubungan dengan G30S dan juga melarang adanya diskusi akademis tentang topik itu. Namun, pada 2008 untuk pertama kalinya Kementerian Luar Negeri RRT mengklasifikasi kembali dokumen diplomatik yang dibuat pada 1961-1965.<sup>9</sup> Koleksi itu terdiri dari dokumen-dokumen yang dibuat oleh berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pertemuan antara para pemimpin tertinggi

7 Diskusi antara Aidit dan Mao, 5 Agustus 1965 diperoleh dari koleksi di bawah judul "Catatan pertemuan antara Ketua Mao dan para Pemimpin Partai-Partai Komunis." Koleksi itu didistribusikan kepada sekelompok sarjana Tiongkok yang dapat mengakses ke Arsip Komite Sentral PKI. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Profesor Chen Jian yang telah berbagi informasi mengenai kumpulan dokumen itu.

8 John Roosa, *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement & Suharto's Coup d'état in Indonesia* (Madison, WI: University of Wisconsin Press, 2006).

9 Ini merupakan kumpulan kedua dari materi yang dideklasifikasi oleh Arsip Kementerian Luar Negeri RRT 1956-60 yang dapat diakses umum pada Juni 2006.

Tiongkok dengan tamu-tamu luar negeri sampai ke komunikasi tingkat rendah antara kedutaan dan konsulat di luar negeri dengan Beijing. Kumpulan dokumen yang ada hubungan dengan Indonesia terdiri lebih dari 250 koleksi dokumen, setebal hampir 2.000 halaman. Akan tetapi, pada musim panas 2013 Arsip Kementerian Luar Negeri RRT mengklasifikasi kembali bagian utama dari koleksi tersebut. Keputusan itu telah membatasi akses kepada hampir semua dokumen yang dipergunakan sebagai sumber untuk menulis artikel ini. Sedikit sekali jumlah sarjana Tiongkok yang telah memublikasikan karya dalam bahasa Tiongkok yang menggunakan dokumen tersebut sebagai sumber. Tambahan lagi, sebagai suatu bentuk sensor diri, tak ada satu pun dari para penulis itu yang secara langsung menyentuh soal G30S.<sup>10</sup> Di samping dokumen resmi di Beijing yang isinya baru tapi sekarang tak dapat lagi diakses langsung itu, sumber untuk penulisan artikel ini juga didapat dari koleksi *Academia Historica* di Taiwan, dan catatan dari Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub) di Indonesia. Penulis juga menggunakan berbagai memoar dalam Bahasa Indonesia dan Tionghoa, dan wawancara dengan para saksi di kedua negara mengenai peristiwa lain yang ada hubungannya dengan topik itu.

Penulis akan mendiskusikan tuduhan mengenai keterlibatan RRT dalam G30S pertama-tama dengan menuturkan secara singkat peristiwa pada pagi hari 1 Oktober 1965 itu. Kemudian penulis menggambarkan pola perkembangan hubungan bilateral Beijing-Jakarta pada awal 1960-an. Itu kemudian dilanjutkan dengan membicarakan hal yang berkaitan dengan empat persoalan: *Pertama*, bantuan militer

10 Lihat Taomo Zhou, "Huaqiao wenti de zhengzhi xuanwo: jidexi zhongguo1958-1962nian dui yindunxiya zhengce" [Kericuhan yang disebabkan oleh Isu Etnis Tionghoa di Indonesia 1958-1962], *Cold War International Studies* 9 (Summer 2010), hlm. 155-74 dan Yiping Li dan Yuleng Zeng, "1958-1965 nian dui yinni de yuanzhu [Bantuan Tiongkok kepada Indonesia, 1958-1965], *Southeast Asian Affairs* [versi Bahasa Tionghoa], 3 (2012), hlm. 21-36.

Beijing atas rencana pembentukan Angkatan ke-5.<sup>11</sup> Kedua, kemungkinan transfer materi dan teknologi nuklir dari Tiongkok ke Indonesia. Ketiga, bantuan medis Tiongkok untuk memelihara kesehatan Soekarno, dan keempat, hubungan antara PKT dengan rekan seideologinya, PKI. Tiga isu pertama bertalian dengan latar belakang hubungan Tiongkok-Indonesia yang menyebabkan terjadinya peristiwa berdarah September 1965. Sedangkan yang terakhir bertalian dengan pengetahuan atas dan keterlibatan Tiongkok dengan G30S.

### Latar Belakang

Di pagi buta tanggal 1 Oktober 1965, beberapa unit tentara dari pasukan pengawal istana (Resimen Cakra-birawa), di bawah pimpinan Letkol Untung, menculik dan kemudian membunuh enam jenderal anti komunis Angkatan Darat. Para penculik kemudian mengumumkan tentang pembentukan Dewan Revolusi, komite yang para anggotanya terdiri dari unsur-unsur kekuatan sayap kiri, kanan, dan netral, yang telah mengambil alih kekuasaan. Dewan Revolusi juga mengumumkan telah menempatkan Presiden Soekarno berada di bawah perlindungannya sebagai salah satu dari rentetan aksi untuk mencegah rencana kudeta yang akan dilancarkan Dewan Jenderal. Pengumuman itu juga mengatakan bahwa Dewan Jenderal yang menurut tuduhan terdiri dari para perwira tinggi Angkatan Darat itu didukung oleh Amerika. Keesokan harinya, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) melancarkan serangan balasan yang

11 Angkatan ke-5 adalah konsep untuk membentuk kelompok milisi, terdiri dari petani dan buruh yang dipersenjatai untuk memperkuat dan menambah kekuatan bersenjata yang sudah ada: Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian.

sangat efektif dan merebut kembali penguasaan atas markas komando G30S di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah.<sup>12</sup>

Penelitian terkini memberikan indikasi bahwa ada kelompok terselubung di dalam PKI, termasuk Aidit, tapi tidak mengikutsertakan anggota Politbiro lain serta organisasi di bawahnya, yang merencanakan G30S. Tujuan gerakan adalah menyingkirkan para jenderal senior yang dianggap anti komunis dengan cara menculik mereka. Itu dimaksudkan untuk membuka lebar hegemoni komunisme dalam politik Indonesia.<sup>13</sup> Akibat dari kampanye anti komunis di seluruh negeri yang dimulai pemerintah Soeharto menyusul dilumpuhkannya gerakan itu, ada sejumlah besar anggota masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia telah dibunuh, ditahan, dan dipenjarakan. Ada juga di antara mereka yang dipaksa untuk meninggalkan Indonesia, walaupun ada sebagian dari anggota etnis minoritas itu telah bekerja sama dengan militer Indonesia.<sup>14</sup> Pada 1967 Beijing memutuskan hubungan diplomatik dengan Jakarta.

Salah satu alasan utama dari tindakan kekerasan terhadap golongan etnis Tionghoa dan pemutusan hubungan diplomatik Indonesia-RRT adalah tuduhan tentang keter-

12 Untuk gambaran mengenai G30S dan pembunuhan massal yang menyusulnya, lihat Robert Cribb, "The Indonesian Massacres" dalam *Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts*, ed. Samuel Totten, William Parsons, and Israel N. Charny, 2nd Edition (New York, NY: Routledge, 2004), hlm. 2332-62. Untuk interpretasi berbeda mengenai G30S dalam literatur berbahasa Inggris, lihat Arnold Brackman, *Communist Collapse in Indonesia* (New York, NY: W. W. Norton & Company); W. F. Wertheim, "Suharto and the Untung Coup—The Missing Link," *Journal of Contemporary Asia* (Winter 1970), hlm. 50-57; Benedict Anderson dan Ruth T. McVey, "A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia" (Ithaca, NY: Cornell University Southeast Asia Program Publications, 1971); Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1978); dan Roosa, *Pretext for Mass Murder*.

13 Roosa, *Pretext for Mass Murder*.

14 Berlawanan dengan persepsi bahwa Etnis Tionghoa di Indonesia menjadi sasaran utama kekerasan, Robert Cribb dan Charles Coppel mengajukan argumentasi bahwa pada 1965-1966 jumlah etnis Tionghoa yang menjadi korban pembantaian tak sebanyak orang pribumi. Lihat Robert Cribb dan Charles A. Coppel, "A Genocide that Never Was: Explaining the Myth of Anti-Chinese Massacres in Indonesia, 1964-1966," *Journal of Genocide Research* 11.4 (Desember 2009): hlm. 447-465. Argumentasi Coppel dan Cribb dikonfirmasi oleh riset yang lebih baru oleh Yen-ling Tsai dan Douglas Kammen tentang Etnis Tionghoa di Medan. Lihat Yen-ling Tsai dan Douglas Kammen, "Anti-communist Violence and the Ethnic Chinese in Medan, North Sumatra," dalam *Contours of Mass Violence in Indonesia: 1965-1966*, ed. Douglas Kammen and Katherine McGregor (Singapore: National University of Singapore Press, 2012), hlm. 131-55.

libatan RRT dalam G30S. Tuduhan itu mencuat dari latar belakang yang lebih luas hubungan bilateral antara kedua negara selama awal tahun-tahun 1960-an. Mulai 1960 sampai bulan-bulan menjelang meletusnya gerakan tersebut, Tiongkok dan Indonesia merupakan rekan dekat dalam dunia pasca kolonial. RRT dan Indonesia sama-sama menganut aspirasi untuk menggantikan struktur dunia bipolar yang didominasi Washington dan Moskow. Keduanya berambisi untuk mengganti pola susunan dunia menjadi lebih adil dengan memasukkan otonomi bagi negara-negara Dunia Ketiga. Kedekatan antara kedua negara itu ditambah oleh sikap PKI yang memilih untuk berpihak ke Beijing dalam pertentangan Tiongkok-Uni Soviet.<sup>15</sup> Kunjungan tingkat tinggi, pertukaran budaya, pendidikan, dan kerja sama ekonomi antara kedua negara mencapai klimaksnya pada 1964-1965. Dalam pidato memperingati HUT RI yang terakhir sebelum G30S terjadi, Soekarno mendeklarasikan "sekarang kita mendukung terbentuknya sebuah poros anti imperialis—poros Jakarta-Pnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang."<sup>16</sup>

Aliansi yang begitu dekat dengan Tiongkok telah mendorong Soekarno untuk lebih lekat dengan golongan kiri dalam politik domestik. Pada 1959 Soekarno mengganti sistem demokrasi konstitusional dengan "Demokrasi Terpimpin."<sup>17</sup> Sebab, menurut Soekarno, sistem demokrasi

15 PKI adalah partai terbesar ketiga setelah Partai Komunis Soviet dan Partai Komunis Tiongkok.

16 Marshall Green, *Indonesia: Crisis and Transformation, 1965-1968* (Washington, DC: The Compass Press, 1990), hlm. 36.

17 Gagasan dasar dari Demokrasi Terpimpin mungkin terinspirasi oleh kunjungan Soekarno ke Tiongkok pada 1956. Soekarno sangat kagum oleh kemajuan di Tiongkok dan sistem politik yang begitu terpusat di negeri itu. Soekarno memberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin pada 1959 dengan sebuah dekrit presiden pada 5 Mei. Dalam dekrit tersebut istilah "Demokrasi Terpimpin" tidak digunakan akan tetapi inti dari sistem baru itu tersirat di dalamnya. Tentang asal-usul Demokrasi Terpimpin, lihat Hong Liu, *China and the Shaping of Indonesia, 1949-1967* (Singapore: NUS Press, 2011), hlm. 205-30. Berbagai studi tentang politik Indonesia selama periode tersebut termasuk Daniel S. Lev, *The Transition to Guided Democracy, 1957-1959* (Jakarta: Equinox Publishing, 2009); J. D. Legge, *Sukarno: A Political Biography* (New York, NY: Praeger Publishers, 1972); and Herbert Feith, "Dynamics of Guided Democracy, dalam Ruth Thomas McVey, ed., *Indonesia* (New Haven, CT: Southeast Asian Studies, Yale University by arrangement with HRAF Press, 1963, hlm. 309-55.

konstitusional ternyata telah menjadi sistem tak efektif lantaran efisiensi yang rendah, instabilitas politik, dan kecilnya dukungan publik dalam tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Sistem institusional baru itu merupakan sistem lebih otoriter dan lebih banyak ditentukan oleh perimbangan kekuatan antara Soekarno dan Angkatan Darat.<sup>18</sup> Sebagai akibatnya, dalam dinamika politik domestik seperti itu, Soekarno sangat menggantungkan diri pada musuh bebuyutan tentara, yaitu PKI. Ketergantungan pada PKI ini terutama dalam mengorganisasikan dukungan massa. Selama tahun-tahun terakhir Demokrasi Terpimpin sampai meletusnya G30S, hubungan Soekarno dengan PKI makin erat dan ini membuat tentara tidak bahagia. Setelah G30S, sikap antipati itu ditujukan kepada pihak yang disebut sebagai sponsor asing PKI, yang tidak lain dari PKT dan RRT.

### **Bantuan Militer RRT dalam Rencana Pembentukan Angkatan ke-5**

Pada awal 1965, Tiongkok mendorong Soekarno untuk membentuk Angkatan ke-5 dan mulai menyalurkan program bantuan militer kepada Indonesia. Keputusan itu didasarkan pada persepsi kalangan kepemimpinan Tiongkok tentang makin meningkatnya agresi Barat di Asia Tenggara dan bukan karena mengetahui lebih dahulu tentang adanya rencana G30S. Pada 1963 dan 1964 Tiongkok menjadi tuan rumah dua pertemuan rencana strategis buat mempromosikan revolusi di Asia Tenggara. Pada akhir September 1963, Zhou Enlai pergi ke Conghua, Provinsi Guangdong untuk bertemu dengan para pemimpin komunis dari Vietnam, Laos, dan Indonesia. Hadir dalam pertemuan tersebut Ho Chi Minh dan Le Duan dari Partai Pekerja Vietnam, Kaysone Phomvihane

18 Feith, "Dynamics of Guided Democracy," hlm. 323.

dari Partai Rakyat Laos, dan Aidit yang mewakili PKI.<sup>19</sup> Dalam pidato pembukaannya Perdana Menteri RRT Zhou Enlai mendeklarasikan bahwa Asia Tenggara telah menjadi wilayah kunci bagi perjuangan internasional menentang imperialisme. Ia juga mengumumkan: "Misi dasar revolusi di Asia Tenggara adalah demi menentang imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme komprador"<sup>20</sup> Untuk mencapai tujuan ini, Zhou menganjurkan agar partai-partai komunis di Asia Tenggara harus, pertama "menarik massa dan memperluas front persatuan." Kedua, "masuk dalam-dalam ke pedesaan, menyiapkan perjuangan bersenjata dan membentuk daerah basis," dan ketiga, memperkuat kepemimpinan. Sebagai tambahan dari anjuran tersebut, Zhou juga memberikan klarifikasi tentang peran Tiongkok di wilayah itu. Katanya lagi, "sebagai garis belakang yang terpercaya dari revolusi-revolusi di Asia Tenggara, Tiongkok punya kewajiban buat mendukung secara penuh berbagai perjuangan anti imperialisme di wilayah ini."<sup>21</sup>

Dimasukkannya PKI dalam pertemuan tersebut sangat signifikan.<sup>22</sup> Itu memberikan indikasi akan ketertarikan Beijing dalam mendorong revolusi di wilayah luas Asia Tenggara, dan bukan merupakan anjuran Mao terhadap PKI untuk melancarkan perjuangan bersenjata menentang Soekarno. Berlawanan dengan itu, Tiongkok malahan mendorong PKI untuk melanjutkan kebijakan front persatuan dengan presiden Indonesia itu. Tujuan utamanya adalah mengeksploitasi konfrontasi Indonesia menentang pembentukan Malaysia sebagai penyeimbang kekuatan Barat di Asia Tenggara. Tujuan konfrontasi Indonesia adalah untuk membendung rencana Inggris mempersatukan bekas-bekas

koloninya di Asia Tenggara ke dalam Federasi Malaysia. Selama 1963-1964 Indonesia hampir berperang melawan Malaysia, sedangkan hubungan dengan Inggris dan Amerika makin memburuk dalam tempo cepat. Beijing dengan penuh semangat menawarkan dukungan dengan memberi janji untuk mengintervensi secara militer apabila kekuatan Barat menyerang Indonesia. Pada awal 1965, Zhou mengumumkan bahwa Tiongkok, dalam posisi sebagai teman Indonesia, tak akan "berpangku tangan" kalau imperialisme Barat berani menyerbu Indonesia.<sup>23</sup>

Tambahan lagi, walaupun revolusi Tiongkok menjadi contoh yang mungkin diikuti PKI, posisi PKT tetap pada pendirian bahwa perjuangan bersenjata bukan merupakan strategi terbaik di Indonesia. Sejak awal dasawarsa 1950-an PKI telah menuai sukses politik dengan mempraktikkan strategi front persatuan. Malahan, pada awal 1960-an ketika PKI memilih condong ke PKT dalam perbedaan pendapat Tiongkok-Soviet, PKT tidak mengubah pendirian dasar tentang tak direstunya pilihan perjuangan bersenjata. Pilihan PKI untuk menempuh jalan parlementer dan menciptakan aliansi dengan Soekarno juga diakui oleh PKT sebagai "garis kebijakan yang benar." Ketika Aidit mengunjungi Sekolah Partai Pusat pada 1963, direktur sekolah tersebut, Kang Sheng, berbicara dengan mengatasnamakan PKT. Ia berkata, "Di bawah pimpinan kamerad Aidit, PKI dengan sangat jenius telah menggabungkan teori universal Marxisme-Leninisme dengan kekhasan revolusi Indonesia. Karenanya, juga telah mengembangkan teori dan kebijakannya dan oleh sebab itu pula telah memperkaya pengembangan atas

19 Qiang Zhai, *China and the Vietnam Wars, 1950-1975* (Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 2000), hlm. 117-19.

20 Tong Xiaopeng, *Fengyu sishinian* [Empat puluh Tahun dalam Segala Cuaca], vol. 2 (Beijing: Zhongyang Wenxian Chubanshe, 1996), hlm. 219.

21 *Ibid.*

22 Zhai, *China and the Vietnam Wars*, hlm. 117-19.

23 Zhou menggunakan kata-kata keras yang sama sebelum Tiongkok terjun ke medan Perang Korea, "women buhui buguan" [kami tidak akan berpangku tangan]. Lihat "Pertemuan Kedua antara Perdana Menteri Zhou Enlai dan Wakil Perdana Menteri Chen Yi dengan Wakil Perdana Menteri I Subandrio," 25 Januari 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01910-02.

Marxisme-Leninisme.”<sup>24</sup> Dua pertemuan strategis di mana para pemimpin Tiongkok berperan sebagai tuan rumah pada 1963-1964, rupanya tidak dimaksudkan untuk mengubah posisi strategis PKI di Indonesia.

Pada pertengahan Januari 1965, Aidit mengusulkan kepada Soekarno gagasan pembentukan Angkatan ke-5—kelompok milisi bersenjata terdiri dari buruh dan tani.<sup>25</sup> PKI menganggap pembentukan Angkatan ke-5 sebagai upaya yang pada satu sisi sejalan dengan agenda anti imperialisme Soekarno dan pada sisi lain sebagai alat penyeimbang terhadap kekuatan tentara. PKI mengajukan usul itu sebagai cara untuk mendukung formulasi atas buah pikiran Soekarno tentang gagasan NASAKOM (Nasional-Agama-Komunis).<sup>26</sup> Di bawah formula ini, PKI merasa yakin bahwa anggotanya akan terwakili dengan cukup di dalam organisasi milisi yang akan segera dibentuk itu. Akan tetapi, kaum nasionalis, dalam hal ini PNI dan golongan agama, dalam hal ini Nahdlatul Ulama, juga akan memasukkan para anggotanya ke dalam organisasi itu dan juga akan dipersenjatai. Jadi, pembentukan Angkatan ke-5 bisa saja akan menguntungkan PKI walaupun tidak secara maksimal. Namun, para pemimpin PKI berharap bahwa dalam masa panjang ke depan Angkatan ke-5 akan membantu PKI dalam bersaing dengan para rivalnya dan memfasilitasi perjuangannya untuk meningkatkan posisinya secara berangsur-angsur sebagai salah satu kekuatan dalam pemerintahan.

Menurut memoar Subandrio, pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama, Soekarno mengangkat gagasan Angkatan ke-5 pada 1965 sebagai jalan keluar untuk mengakomodasikan bantuan militer tanpa

24 "Kamerad Aidit Diundang untuk menyampaikan Laporan Politik di Sekolah Pusat Partai," *Renmin Ribao* [Harian Rakyat], 3 September 1963.

25 *Harian Rakyat*, 15 Januari 1965. Aidit mengatakan ada 10 juta petani dan 5 juta buruh siap untuk dipersenjatai. Dikutip dalam Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hlm. 17-28 dan hlm. 87.

26 *Ibid.*, 19 Mei 1965.

syarat yang ditawarkan Tiongkok untuk pembentukan 40 batalyon milisi menjelang akhir 1963.<sup>27</sup> Ini mungkin saja tidak akurat. Antusiasme Beijing untuk memberikan bantuan militer kepada Indonesia baru muncul setelah pertengahan 1964. Antara 1960-1963 Beijing "menolak sebagian besar permintaan Indonesia dan hanya menyetujui sebagian kecil saja dari permohonan itu."<sup>28</sup> Namun, justru Soekarno sendiri mengklaim Zhou Enlai-lah yang mengusulkan gagasan pembentukan Angkatan ke-5, yang akan terdiri dari 20 juta relawan yang telah mendaftarkan diri dalam tahun 1964.<sup>29</sup> Apa yang dikatakan Soekarno, walaupun masuk akal, tak dapat diverifikasi oleh bukti-bukti arsip dari pihak RRT. Namun, dapat dikonfirmasi bahwa Beijing sangat menyetujui gagasan tentang Angkatan ke-5 itu. Pada akhir Januari 1965, ketika Subandrio mengunjungi Tiongkok Zhou Enlai mengatakan kepadanya:

*Usul Presiden Soekarno untuk mempersenjatai massa terpercaya merupakan gagasan yang benar. Presiden Anda adalah panglima tertinggi dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian Indonesia. Harus ada kekuatan lain, yakni milisi. Soekarno juga harus menjadi panglima tertinggi dari milisi ini. Dan tentu saja itu harus dibentuk dengan cara berangsur-angsur. Milisi ini harus menjaga dan mempertahankan wilayah darat, udara, dan perairan negara. Tambahan lagi, karena terdiri dari orang-orang sipil, milisi itu dapat digunakan untuk perang gerilya rakyat di Kalimantan Utara . . . massa yang dipersenjatai adalah kekuatan tangguh . . . saya berbagi dengan anda pengalaman kami. Mohon sampaikan ini kepada presiden anda.*<sup>30</sup>

27 Dr. H. Subandrio, *Kesaksianku tentang G-30-S* (Jakarta: Forum Pendukung Reformasi Total, 2001)

28 "Hubungan Persahabatan dengan Militer Indonesia dan Bantuan Militer Kita kepada Indonesia," 4 Januari 1963, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01560-02.

29 *Berita Yudha*, 2 Juni 1965, dikutip dalam Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hlm. 89-90.

30 *Ibid.* Saran ini diulangi dalam "Buletin Diplomasi tentang Kunjungan Wakil Perdana Menteri I Subandrio dan Perundingan Bilateral," 2 Februari 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01318-05.

Angkatan Darat Indonesia menentang keras gagasan pembentukan Angkatan ke-5 ini. Angkatan Darat juga secara implisit menentang turut campur Tiongkok dalam masalah ini. Menteri Pertahanan Jenderal Abdul Haris Nasution<sup>31</sup> dengan terang-terangan mengatakan bahwa "adalah mustahil kekuatan bersenjata itu bekerja dengan efektif kalau komandannya dari PNI, dengan para deputinya terdiri dari orang-orang dari kelompok agama dan komunis."<sup>32</sup> Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal A. Yani,<sup>33</sup> kemudian menciptakan formula yang memungkinkan para pemimpin militer memberikan dukungan hanya sebatas kata-kata saja terhadap konsep NASAKOM sambil mengesampingkannya.<sup>34</sup> Dorongan Tiongkok terhadap gagasan Angkatan ke-5 juga digunakan oleh Angkatan Darat Indonesia dalam kampanye untuk menentang gagasan itu. Pada 29, 30 Juni, dan 1 Juli 1965 surat kabar Angkatan Bersenjata menerbitkan sebuah tulisan panjang dalam tiga seri berjudul "Angkatan ke-5 Tidak Cocok untuk Kondisi Obyektif di Indonesia." Tulisan ini merupakan bagian dari upaya propaganda sistematis untuk menggagalkan rencana tersebut.<sup>35</sup> Penulisnya, seorang kolonel bernama Lapase, mengajukan argumentasi dengan mengutip "sumber dari Kedutaan Tiongkok," yang menentang pembentukan Angkatan ke-5, karena perbedaan antara sistem politik di Tiongkok dan di Indonesia. Menurut penulisnya itu, kedua pemerintahan memiliki struktur berbeda. Menurut dia lagi, sistem sosialis di Tiongkok jauh lebih maju ketimbang sistem yang berlaku di Indonesia. Ia juga menekankan:

31 Nasution selamat walaupun menjadi salah satu target penculikan dari G30S karena kesalahan para penculik untuk mengenalinya. Ia tetap menduduki jabatan dari masa pra-G30S sampai 25 Juli 1966 dan kemudian menjabat sebagai kepala staf angkatan bersenjata.  
32 Berita Yudha, 25 Mei 1965. Dikutip dalam Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hlm. 88.  
33 Kelompok G30S membunuh Yani ketika mereka mencoba untuk menculiknya.  
34 Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hlm. 88.  
35 Kolonel Lapase, "Angkatan ke-V tidak tjojok dengan suasana objektif di Indonesia, I, II dan III," Angkatan Bersenjata, 29, 30 Juni dan 1 Juli 1965.

*Di Indonesia ada sembilan atau sepuluh partai politik yang boleh dikatakan sama-sama kuat. Tapi di Tiongkok hanya ada satu partai yang memerintah. Dengan kata lain, di Tiongkok, pengaruh utama politik hanya berasal dari satu sumber dan juga hanya ada satu ideologi politik. Jadi, di Tiongkok akan lebih mudah untuk menjalankan kontrol atas milisi. Namun, di Indonesia, akan sangat sukar dilaksanakan.<sup>36</sup>*

Lapase kemudian menyimpulkan, pekerja, kaum tani, pemuda dan mahasiswa memang harus dipersenjatai, akan tetapi tidak diorganisasikan oleh kekuatan militer yang terpisah.<sup>37</sup>

Tiongkok merasa terusik dengan penyebutan nama terang-terangan dalam perdebatan sekitar Angkatan ke-5 itu. Lapase datang mengunjungi Atase Militer Tiongkok pada 24 Juni 1965 dan mengajukan permintaan untuk memperoleh klarifikasi mengenai gagasan pembentukan Angkatan ke-5 itu. Tak lama kemudian ia menerima jawaban yang sangat hati-hati berupa pengantar mengenai milisi Tiongkok dari Kementerian Luar Negeri Beijing. Seiring dengan diterbitkannya artikel Lapase itu Kedutaan Besar RRT di Jakarta mengeluarkan pernyataan berisi kritik diri "karena tak waspada terhadap maksud dia [Lapase]." Menurut pernyataan Kedutaan Besar RRT itu "Lapase telah dengan terang-terangan memanfaatkan kesempatan dengan cara menggunakan nama Kedutaan Besar RRT untuk menggagalkan gagasan pembentukan Angkatan ke-5."<sup>38</sup> Kantor Atase Militer Tiongkok di Jakarta melaporkan ke Beijing bahwa "Soekarno . . . ingin memanfaatkan peluang ini untuk membentuk kekuatan militer tambahan sebagai

36 Kolonel Lapase, "Angkatan ke-V tidak tjojok dengan suasana objektif di Indonesia II, Angkatan Bersenjata, 30 Juni 1965.  
37 Kolonel Lapase, "Angkatan ke-V tidak tjojok dengan suasana objektif di Indonesia, Angkatan Bersenjata, 1 Juli 1965.  
38 "Tentang Pembentukan 'Angkatan ke-5' di Indonesia," 25 Juni-12 Juli, 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01694-02.

penyeimbang kekuatan Angkatan Darat. Kelompok kiri mendukung gagasan itu demi menggunakan kesempatan itu untuk mempersenjatai buruh dan tani. Yani menentanginya karena ingin mempertahankan *status-quo* . . . Sedangkan Angkatan Udara tak sudi berada di bawah Angkatan Darat."<sup>39</sup> Sebuah laporan analitis kedutaan di Jakarta mengusulkan kepada Beijing untuk bersikap hati-hati terhadap isu mengenai Angkatan ke-5:

*Perdebatan yang tengah berlangsung sekarang ini terfokus pada dua pertanyaan: apakah buruh dan tani harus dipersenjatai dan apakah suatu kekuatan militer lain harus dibentuk. Penelitian kami memunculkan hasil bahwa jawaban untuk pertanyaan pertama adalah harus. Sedangkan jawaban buat pertanyaan kedua, adalah penting untuk mempertimbangkan kemungkinannya, walaupun kita mestinya tidak mengajukan pengalaman kita ke tingkat yang ekstrem. Kalau kita kelewat menawarkan gagasan ini hasilnya hanya akan mengundang serangan dari sayap kanan. Namun, dengan mempertimbangkan keadaan di Indonesia, suatu kekuatan militer tambahan akan menjadi alat penyeimbang dalam berhadapan dengan Angkatan Darat Indonesia.*<sup>40</sup>

Walaupun di dalam negeri muncul silang pendapat mengenai pembentukan Angkatan ke-5 itu, pada akhir Juni 1965 Soekarno mengutus sebuah delegasi yang terdiri dari para relawan untuk berkunjung ke Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam. Mereka mendapat tugas untuk mempelajari milisi di ketiga negara itu, dan juga mengumpulkan informasi tentang bagaimana institusi politik, susunan kekuatan, mata rantai komando, dan ideologi berdampak terhadap mobilisasi dan militerisasi massa. Selama mereka berada di Tiongkok,

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> "Tentang Kunjungan Relawan Indonesia ke Tiongkok," 23 Juni 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01689-01.

Kol. Willy Sujono,<sup>41</sup> salah satu pimpinan rombongan, mengungkapkan kepada tuan rumahnya dari Tiongkok bahwa ada sebanyak 20 juta orang telah mendaftar untuk menjadi tentara relawan. Menurut pendapatnya jumlah itu relatif kecil dibandingkan dengan total penduduk Indonesia yang 105 juta pada 1965.<sup>42</sup> Sebagian dari para relawan itu dikirim ke Kalimantan Utara untuk mendidik massa, membuka tanah-tanah liar, dan membentuk daerah basis perjuangan. Menurut Willy Sujono lagi, Indonesia tidak mungkin mempersenjatai rakyat dengan mendadak lantaran golongan kontra revolusi akan memanfaatkan situasi seperti itu. Karenanya, di Indonesia, "perbaiki kesadaran rakyat harus dinomorsatukan, pengorganisasian massa nomor dua, dan militerisasi menjadi langkah terakhir."<sup>43</sup>

Ketika menerima delegasi relawan Indonesia, Kepala Staf Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) Jenderal Luo Ruiqing menunjukkan sikap menahan diri dengan mengatakan kepada mereka. "Apakah Anda sekalian dapat mengikuti pengalaman Tiongkok, Anda sendirilah yang bisa menjawabnya berdasarkan situasi di Indonesia sendiri. Lingkungan di setiap negara saling berlainan. Pengalaman kami hanya menjadi referensi untuk Anda. Kita semua harus memulainya dari

<sup>41</sup> Menurut sebuah laporan intelijen tentang Jawa Timur yang diterjemahkan Ben Anderson, Sujono adalah komandan militer untuk wilayah Madiun. Laporan tersebut memuji Sujono sebagai tokoh militer yang tegas dalam berurusan dengan PKI. Lihat "Report from East Java," Indonesia 41 (April 1986), hlm. 137 dan 142. Namun, dalam laporan yang telah diklasifikasi kembali, dibuat oleh seorang agen CIA bernama Richard Cabot Howland, Sujono adalah komandan dari wilayah Kediri, dan telah menjadi informan paling utama untuk Stanley Karnow, seorang wartawan yang pada 1966 menulis beberapa laporan terbaik mengenai kekerasan massa menyusul terjadinya G30S. Howland mendapat laporan dari kelompok Baptis Amerika di Kediri yang curiga kalau Sujono tak lain dari seorang simpatisan PKI sebelum G30S terjadi dan sebenarnya hanya berusaha untuk mencegah serangan terhadap dirinya, karena mendukung pembunuhan atas anggota dan simpatisan PKI. Lihat Richard Cabot Howland, "The Lessons of the September 30 Affair," dapat diakses melalui <https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-csi/vol14n02/pdf/v4i2a02/pdf/v4i2p.pdf>, hlm. 23-26, diakses pada 14 Juli 2014. Penulis mengucapkan terima kasih kepada John Roosa yang telah berbagi informasi mengenai identitas Willy Sujono dengan penulis.

<sup>42</sup> <http://www.populstat.info/Asia/indonesc.htm>, diakses pada 15 Juli 2014

<sup>43</sup> "Matlamat Penyambutan Para Relawan Indonesia," 1-2 Juli 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01689-07.

lingkungan spesifik di negeri kita sendiri.<sup>44</sup> Pada waktu bertemu dengan delegasi itu, Zhou Enlai juga menekankan akan fakta bahwa secara geografis Indonesia sangat berbeda dengan Tiongkok. Tiongkok kekurangan pengalaman militer dalam beroperasi di wilayah kepulauan. Indonesia harus mencari cara terbaik yang cocok dengan situasinya sendiri.<sup>45</sup>

Silang pendapat mengenai Angkatan ke-5 tetap saja tak ada jalan keluarnya sampai sebelum G30S terjadi. Dalam pidatonya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1965 Presiden Soekarno juga menyentuh masalah itu. Ia mengatakan, hanya "... setelah memikirkan tentang persoalan itu dengan mendalam saya akan membuat keputusan."<sup>46</sup> Angkatan Udara (AURI), yang hubungannya dengan Angkatan Darat tidak begitu serasi menyambut baik gagasan pembentukan Angkatan ke-5 itu. Panglima AURI, Marsekal Muda Omar Dani, membuat pernyataan dengan mengatakan, "Alangkah hebatnya kekuatan kita apabila rakyat, sebagai kekuatan ke-5, dipersenjatai seperti juga keempat angkatan lainnya."<sup>47</sup> Sikap satu kata masih belum tercapai mengenai isu Angkatan ke-5 itu. Namun, dalam beberapa bulan sebelum G30S meletus, sekitar 2.000 orang anggota PKI dan berbagai organisasi yang berafiliasi dengannya memperoleh pelatihan singkat dalam beberapa pekan di lapangan udara Halim.

Gagasan mengenai Angkatan ke-5 menjadi perdebatan besar di hadapan publik. Namun, perundingan mengenai bantuan senjata dari RRT dilakukan di balik pintu tertutup antara para pemimpin Tiongkok dan Indonesia. Pada Januari

44 "Catatan Pertemuan Antara Kepala Staf TPR Jenderal Luo Ruiqing, Sekretaris Komite Sentral Politik dan Legislatif PKT Peng Zhen dan Delegasi Relawan Indonesia," 29 Juni 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01689-02.

45 "Catatan Pertemuan antara Perdana Menteri Zhou Enlai dan delegasi Relawan Indonesia (mengenai Konferensi Asia-Afrika dan isu-isu lain)," 11 Juli 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01689-03.

46 Pidato Presiden Soekarno, dikutip dalam Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hlm. 93.

47 *Harian Rakyat*, 7 Juni 1965, dikutip dalam Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, hlm. 90.

1965, Beijing berjanji untuk memberi bantuan senjata ringan kepada Indonesia tanpa syarat apa pun. Jenderal Luo Ruiqing bertemu dengan serombongan personil militer Indonesia. Hadir dalam kelompok yang menyertai kunjungan Subandrio itu Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Intelijen dan para Asisten Satu Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Dalam pertemuan tersebut Luo Ruiqing mengatakan, "Sekarang kami dapat memproduksi senjata ringan untuk keperluan pasukan infanteri. Kalau Anda sekalian memerlukan senjata ringan, kami dapat membantu. Andaikata Angkatan Laut dan Angkatan Udara Anda memerlukan suku cadang, silakan saja untuk setiap saat mengirim staf Anda ke sini untuk meninjau."<sup>48</sup> Dalam pertemuan dengan Subandrio, Mao Zedong juga mengatakan, "Senjata paling utama adalah senjata ringan... persoalan paling menentukan adalah untuk menghadapi musuh dalam radius 200 meter."<sup>49</sup>

Karena dibuat atas dasar tingkat hubungan antarpemerintah, tawaran Tiongkok itu pada intinya mungkin didesain dengan pola pikir untuk seluruh negeri dan untuk keempat cabang angkatan bersenjata (Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian). Namun, pada akhirnya hanya Angkatan Udara saja yang mengajukan usul untuk memperoleh senjata ringan itu. Pada Februari 1965, Subandrio memberi tahu Yao Zhongming, duta besar RRT di Jakarta, bahwa "Presiden Soekarno telah setuju untuk menerima senjata-senjata ringan yang ditawarkan Tiongkok."<sup>50</sup> Subandrio juga mengatakan bahwa presiden akan segera mengirim seorang utusan khusus untuk mendiskusikan rincian teknis mengenai masalah itu.

48 "Catatan Pertemuan antara Kepala Staf Umum TPR Jenderal Luo Ruiqing dengan Personil Militer Delegasi Indonesia," 27 Januari 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 103-01910-07.

49 "Pertemuan antara Ketua Mao dan Wakil Perdana Menteri Pertama Subandrio," 27 Januari 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01910-04.

50 "Matlamat tentang Pertemuan antara Duta Besar kita untuk Indonesia Yao Zhongming dan Wakil Perdana Menteri Satu Indonesia Subandrio," 11 Februari 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 106-01319-05.

Akan tetapi, persetujuan itu terlambat untuk direalisasikan karena mungkin sebagai akibat dari perdebatan yang begitu hangat tentang Angkatan ke-5 itu. Pada pertengahan September 1965, Presiden Soekarno mengirim Omar Dani ke Beijing, sebagai utusan khusus dalam membicarakan persetujuan rahasia tersebut. Pada akhir Juni 1965, Komodor Andoko yang kemudian mendampingi Omar Dani dalam kunjungan rahasia ke Tiongkok itu datang ke Atase Militer RRT di Jakarta. Ia mengatakan kepada pejabat Tiongkok itu bahwa AURI telah memutuskan untuk "memiliterkan rakyat yang tinggal dalam radius 50 km sekeliling Pangkalan Udara Halim."<sup>51</sup> Tujuan program militerisasi itu, menurutnya lagi, adalah untuk "mencegah sabotase oleh kaum imperialis dan subversi domestik."<sup>52</sup> Andoko juga mengatakan, AURI akan mengirim pesawat untuk mengangkut senjata itu. Di samping itu ia juga menanyakan kepada atase militer itu tentang bagaimana cara menyerahkannya secara langsung kepada AURI. Ketika atase militer Tiongkok memperlihatkan sikap kekhawatiran dan keraguan, Andoko terus menekan dia. Katanya, "kalau kita menunggu sampai adanya kesepakatan di antara keempat angkatan, segalanya akan terlambat."<sup>53</sup> Namun, atase militer itu bersikeras bahwa keputusan mesti dibuat oleh para anggota pimpinan nasional dan dilaksanakan melalui jalur antar pemerintah.<sup>54</sup>

Tampaknya AURI menggunakan alasan demi melindungi Pangkalan Udara Halim sebagai justifikasi permohonan untuk memperoleh senjata ringan itu, dan itu mendapat restu presiden. Soekarno mungkin juga telah menunjuk

51 "Tentang Permintaan senjata AURI untuk Mempersenjatai Rakyat di Wilayah Sekitar Pangkalan Udara Halim," 2 Juli 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01697-02. Lingkaran radius 50 km yang mengelilingi Halim meliputi wilayah luas, AURI mungkin tidak berencana untuk mempersenjatai rakyat yang tinggal di dekat pangkalan udara Halim. Kemungkinan besar Andoko hanya menjustifikasi permintaan AURI saja untuk memperoleh senjata-senjata itu dalam jumlah besar.

52 *Ibid.*

53 *Ibid.*

54 *Ibid.*

Omar Dani sebagai utusan untuk menghadiri pembicaraan mengenai rincian dari persetujuan tersebut justru atas dasar pertimbangan agar Angkatan Udara-lah yang memperoleh senjata-senjata itu, dan bukan Angkatan Darat, Laut, atau Kepolisian. Soekarno boleh jadi menginginkan untuk mengembangkan Angkatan Udara yang para perwiranya menurut pendapat dia, lebih loyal kepadanya. Kemudian itu akan digunakan sebagai alat penyeimbang kekuatan menghadapi Angkatan Darat yang para perwiranya menurut dia kurang setia kepadanya. Pihak Tiongkok kelihatannya sangat mengerti bahwa senjata itu dimaksudkan sebagai alat dukungan dalam menentang "anasir kanan" di dalam Angkatan Darat. Dengan demikian, perlindungan atas Pangkalan Udara Halim hanya merupakan alasan yang dicari-cari. Sebuah laporan analitis yang dibuat atase militer Tiongkok sama sekali tidak menyinggung tentang hal itu. Alasan tentang permintaan yang begitu mendesak dari AURI diinterpretasikan sebagai berikut:

- Angkatan Udara bermaksud memanfaatkan kesempatan untuk mempersenjatai buruh dan tani.
- Angkatan Udara sedang mempersiapkan diri untuk menentang [kemungkinan] serangan kaum imperialis dan sabotase yang dilakukan golongan subversif.
- Angkatan Udara tengah mempersiapkan rencana jangka panjang untuk memperkokoh kekuatannya, khususnya menentang skenario serangan mendadak dari golongan kanan.<sup>55</sup>

Atase militer itu menarik kesimpulan agar "kedutaan besar menganjurkan kepada pihak Indonesia, kalau saja Angkatan Udara mengajukan permohonan itu melalui saluran

55 *Ibid.*

Pemerintah Indonesia, kita dapat mempertimbangkan untuk memenuhi sebagian dari permohonan tersebut.<sup>56</sup>

Pada mulanya Beijing memang khawatir karena hanya didekati oleh Angkatan Udara saja. Namun, di Beijing pada 17 September 1965 Zhou Enlai dan Omar Dani mungkin telah mencapai kesepakatan. Dalam kunjungan ke Indonesia pada akhir Agustus 1965, Chen Yi meyakinkan kembali Subandrio bahwa "kami akan memberikan senjata-senjata itu dengan cuma-cuma."<sup>57</sup> Pada 13 September 1965 Omar Dani berjumpa dengan atase militer Tiongkok di Jakarta dan mengatakan bahwa Angkatan Udara berharap untuk menerima 25 ribu pucuk senjata ringan sebagai bagian dari jumlah 100 ribu pucuk yang ditawarkan Tiongkok kepada Indonesia. Ia sekali lagi mengatakan, senjata-senjata itu akan digunakan untuk mempersenjatai buruh dan tani di sekitar Pangkalan Udara Halim. Omar Dani juga menegaskan bahwa Soekarno telah menyetujui permintaan Angkatan Udara bersama kepolisian untuk mendapat 20 ribu pucuk senjata.<sup>58</sup> Pada 16 September, ketika Omar Dani tiba di Beijing, Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta mengirim telegram balasan ke Kementerian Luar Negeri: "Presiden dan Subandrio telah setuju mengenai kesepakatan tentang senjata ringan [yang berkaitan dengan permintaan Omar Dani]. Kami dapat memenuhi permintaan mereka [Angkatan Udara] untuk memperoleh 25 ribu pucuk. Namun, kami menyarankan hanya dapat mengirim sedikit kurang dari jumlah itu."<sup>59</sup>

56 *Ibid.*

57 "Pertemuan Tertutup antara Wakil Perdana Menteri Chen Yi dan Wakil Perdana Menteri I Subandrio," 22 Agustus 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01912-09.

58 "Rencana untuk Menyambut Komandan AURI, Anggota Staf Angkatan Udara Pakistan dan Daftar Nama Anggota Delegasi Angkatan Udara Pakistan," 13 September 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 204-01123-02.

59 "Rencana untuk Menyambut Komandan AURI, Anggota Staf Angkatan Udara Pakistan, Anggota Delegasi Angkatan Udara Pakistan dan Daftar nama anggota Delegasi Angkatan Udara Pakistan," 16 September 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 204-01123-02.

Tidak ada bukti yang menguatkan dugaan bahwa para pemimpin Tiongkok memenuhi saran dari kedutaan dan memberikan persetujuan mengenai perjanjian itu. Namun, informasi yang diperoleh menunjukkan Beijing cenderung mendukung AURI dalam memperkuat diri untuk menentang "golongan" kanan dalam Angkatan Darat. Dalam arti yang luas, tujuan kunjungan Omar Dani adalah untuk "membicarakan bantuan militer kepada Pakistan, kerja sama antar Angkatan Udara Tiongkok, Indonesia, dan Pakistan dan bantuan militer kita [Tiongkok] kepada Indonesia."<sup>60</sup> Pada pagi hari tanggal 17 September 1965, Zhou Enlai mengadakan pertemuan selama tiga jam dengan Omar Dani dan Duta Besar Indonesia di Beijing, DDjawoto. Sayangnya catatan mengenai pertemuan tersebut belum diklasifikasi ulang. Menurut catatan resmi kegiatan diplomatik Zhou Enlai yang telah dipublikasikan, Zhou menyatakan kekhawatirannya mengenai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika dan berharap untuk mendiskusikannya dengan Soekarno dan Subandrio.<sup>61</sup> Sekembali Omar Dani di Indonesia, secara rahasia Aidit memberi tahu Kedutaan Tiongkok tentang ucapan Omar Dani kepadanya. Kata Omar Dani menurut Aidit, "para kamerad Tiongkok mengakui pentingnya mendukung Pakistan akan tetapi yang lebih penting lagi adalah mempertahankan Indonesia. Omar Dani "merasa sangat terharu," dan berpendapat pandangan Tiongkok tentang situasi di Indonesia "luar biasa tepatnya."<sup>62</sup>

Para pemimpin Beijing bisa saja telah menyetujui permohonan AURI, akan tetapi karena terbatasnya ruang

60 "Persetujuan atas Rencana untuk Menyambut Komandan AURI," 15 September 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 204-01123-02.

61 Pusat Penelitian Sejarah Diplomasi Kementerian Luar Negeri RRT, Zhou Enlai wajijiao huodong dashiji [Kronologi Kegiatan Zhou Enlai dalam Urusan Luar Negeri], (Beijing zhongyang wenxian chubanshe, 1993), hlm. 477-478.

62 "Analisis Kedutaan Kita di Jakarta Mengenai Posisi Indonesia yang Mendukung Pakistan dan Menentang Agresi India," 25 September 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01679-04.

waktu dan kesempatan antara kunjungan Omar Dani dan meletusnya G30S, secara logistik sangat sukar bagi AURI untuk mengatur dan menerima pengiriman senjata-senjata itu. Dalam pengakuannya di depan Mahmillub, Omar Dani mengakui para pemimpin Tiongkok meminta AURI untuk mengatur sendiri pengiriman senjata ringan itu oleh karena Tiongkok sedang menghadapi kesulitan ekonomi.<sup>63</sup> Walaupun catatan pengadilan biasanya kurang dapat dipercaya, pernyataan ini dapat diverifikasi dengan rincian percakapan antara Komodor Andoko dan Atase Militer Tiongkok pada akhir Juni 1965 seperti yang diterangkan di bagian depan dari artikel ini. Tambahan lagi, ini bisa dicocokkan juga dengan keterangan mantan Kepala Badan Tenaga Atom Indonesia (BATAN) Djali Ahimsa, yang berkunjung ke Tiongkok pada 21 September-6 Oktober 1965. Menurut Djali Ahimsa dia bertemu dengan perwira tinggi AURI Sri Muljono Herlambang di Beijing tak lama sebelum G30S meletus. Menurut Sri Muljono Herlambang kepada Ahimsa dia tiba di Beijing dengan menggunakan pesawat pribadi Presiden Soekarno. Misinya, mengajukan permintaan kepada pemerintah Tiongkok untuk mengirimkan senjata-senjata yang telah dijanjikan.<sup>64</sup> Informasi ini mengisyaratkan tentang kemungkinan bahwa rincian persetujuan itu belum tuntas. Atau paling tidak ini menunjukkan detail mengenai persetujuan itu sebagian besar belum diproses untuk pengiriman sampai seminggu sebelum G30S terjadi. Itu semua berhubungan dengan proses perakitan dan pengepakan, di samping juga soal administratif. Kita boleh saja tidak bisa menyangkal fakta bahwa kemungkinan AURI berhasil mengangkut sebagian dari senjata itu ke Indonesia. Namun, fakta lain menunjukkan persenjataan kelompok

63 Omar Dani, Berkas Perkara Omar Dani, ex. Laksamana madya udara dalam peristiwa Gerakan 30 September (Jakarta: Mahkamah Militer Luar Biasa, 1966), hlm. 17.

64 Wawancara dengan Djali Ahimsa, Jakarta, 18 April 2013. Djali Ahimsa tidak ingat tanggal pasti pertemuan itu, tetapi waktu yang mungkin paling awal adalah 22 September 1965.

milisi yang terlibat dalam G30S di Halim sangat minim. Ini juga menunjukkan besarnya kemungkinan kalau senjata-senjata itu belum sampai di Indonesia.<sup>65</sup>

Pertimbangan lain, apabila kita memandang dari segi kuantitas, bantuan militer Tiongkok kepada Indonesia berada jauh di bawah bantuan Uni Soviet. Ketika berkunjung ke Indonesia pada 1960, Krushchev dengan murah hati menyumbang 100 juta dollar AS—salah satu dari sumbangan terbesar Uni Soviet kepada negara non-komunis pada waktu itu.<sup>66</sup> Pada tahun-tahun berikutnya Moskow juga menyumbang senjata kepada Indonesia untuk keperluan Konfrontasi.<sup>67</sup> Menurut suatu laporan intelijen Tiongkok tak lama sebelum G30S, antara 1960 sampai September 1965 ...

*... Uni Soviet telah menandatangani empat bantuan militer yang seluruhnya berjumlah 1.126 juta dollar AS. Pada 1964 Moskow menyumbang perlengkapan kepada Angkatan Laut dan Angkatan Udara senilai 950 juta dollar AS. Pada 1964 Uni Soviet juga menawarkan perlengkapan senilai 176 juta dollar AS kepada Angkatan Darat Indonesia, tetapi sebagian dari alat-alat yang dijanjikan belum sampai. Sembilan puluh persen dari perlengkapan Angkatan Udara dan 80% dari perlengkapan Angkatan Laut juga belum tiba dari Uni Soviet.<sup>68</sup>*

Badan Intelijen Jepang, Institut Riset Tiongkok Daratan memperkirakan, bantuan militer Soviet kepada Indonesia jumlahnya berkisar antara 600 juta dollar AS dan 1.200 juta dollar AS. Badan intel Jepang itu juga memperkirakan jumlah yang sama seperti perkiraan Beijing: 80% sampai 90% dari peralatan Angkatan Udara dan Angkatan Laut Indonesia

65 Lihat Anderson & McVey, A Preliminary Analysis of October 1, 1965, Coup in Indonesia, hal 21 dan Roosa, Pretext for Mass Murder, hlm. 45-46.

66 Ragna Boden, "The Gestapu Events of 1965: New Evidence from Russian and German Archives," *Bijdragen toot de Taal Land-en Volkenkunde (BKI)* 163,4 (2007), hlm. 511.

67 *Ibid.*

68 "Hubungan Indonesia dengan Uni Soviet," 4 Agustus-10 September 1965, Arsip Kemenerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01680-02.

disuplai oleh Uni Soviet.<sup>69</sup> Institut yang berbasis di Jepang itu beranggapan "jumlah seluruh bantuan Tiongkok tidak dapat dibandingkan dengan bantuan Soviet dan tampaknya tak mungkin dapat melewati total jumlah tersebut."<sup>70</sup> Bukti-bukti berupa arsip dari Amerika juga mengidentifikasi fakta mengenai "institusi militer Indonesia hampir seluruhnya disuplai oleh Uni Soviet."<sup>71</sup> Jadi, sulit untuk secara pasti menganggap kalau bantuan militer Tiongkok memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menentukan perkembangan politik di Indonesia pada 1965.

### **Kemungkinan Transfer Materi dan Teknologi Nuklir dari Tiongkok ke Indonesia**

Di samping setuju untuk menyuplai senjata ringan, pada bulan-bulan awal 1965 Tiongkok juga mempertimbangkan kemungkinan untuk mentransfer teknologi nuklir kepada Indonesia. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, konfrontasi Tiongkok dengan Amerika terus berlangsung padahal aliansinya dengan Uni Soviet berantakan. Para pemimpin Beijing menjadikan pengembangan senjata nuklir sebagai prioritas utama. Tujuannya bukan hanya meningkatkan posisi strategis dalam berhadapan dengan kedua adikuasa akan tetapi juga demi memperkuat posisi PKT di dalam negeri sehubungan dengan kegagalan Kampanye Lompitan Jauh ke Depan. Atas dasar pertimbangan faktor-faktor domestik

69 "Hubungan antara bandit-bandit dengan Indonesia, 1965," 1 Oktober-31 Desember 1965, *Academia Historica*, 02000001910A. Istilah "bandit" merupakan referensi baku yang digunakan rezim Kuomintang di Taiwan untuk menyebut rezim komunis di Daratan Tiongkok. Aslinya diterbitkan dalam bahasa Jepang di bawah judul "Bantuan Luar Negeri dari Tiongkok dan Rusia kepada Indonesia," *Mainland China Studies*, April 1965. Diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa oleh Konsulat Taiwan di Osaka.

70 *Ibid.*

71 The Office of Current Intelligence, CIA, "Indonesian Army Attitudes towards Communism," 22 November 1965, Johnson Library, National Security File, Country File, Indonesia, Vol. VI, Nopember 1965-Mei 1966. Dikutip dari *Foreign Relations of the United States 1964-1968*, volume XXVI, <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v26/di78> (diakses pada 19 Februari 2008).

dan internasional itulah Mao dan para kameradnya sangat bersemangat untuk mengembangkan senjata nuklir. Tujuan lainnya adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sebuah negara yang sedang berkembang pun juga memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi nuklirnya sendiri. Bom nuklir pertama milik Tiongkok berhasil dileakkan pada 16 Oktober 1964.

Sebagai salah satu penandatanganan Perjanjian Pelarangan Terbatas Percobaan Senjata Nuklir (Limited Test Ban Treaty)<sup>72</sup> reaksi awal Indonesia terhadap sukses percobaan peledakan nuklir Tiongkok itu sangat ambivalen atau tidak jelas. Duta Besar Tiongkok Yao Zhongming bertemu dengan Subandrio untuk mencari informasi mengenai sikap Indonesia tentang keberhasilan Tiongkok itu. Namun, Subandrio hanya menyampaikan ucapan selamat sebagai basa-basi sebelum mengatakan tentang adanya sikap merasa tak nyaman di kalangan negara-negara Asia-Afrika. Ia menyampaikan kekhawatiran negara-negara itu atas "polusi yang diakibatkan oleh debu dan abu radioaktif."<sup>73</sup> Oleh karena kedua isu tersebut tak saling berhubungan, mungkin Subandrio menggunakan alasan dampak lingkungan dari percobaan nuklir Tiongkok itu sebagai cara untuk menunjukkan ketidaksenangan Indonesia. Selanjutnya Subandrio menerangkan alasan dia mengatakan hal yang tak menyenangkan telinga Tiongkok itu. Katanya, kalau ia memuji-muji keberhasilan Tiongkok, negara-negara lain akan mengatakan bahwa Indonesia tak lain dari "buntut" Tiongkok dan anggota dari "kubu Tiongkok." Pada waktu itu Tiongkok sedang memprotes

72 Indonesia turut menandatangani Limited Test Ban Treaty pada 7 Oktober 1963 di Moskow, Perjanjian itu melarang percobaan nuklir di permukaan bumi, di bawah air, dan di luar angkasa, tapi tak membatasi percobaan di bawah tanah. Dikutip dari Robert M. Cornejo, "When Sukarno Sought to Bomb: Indonesia Nuclear Aspirations in the Mid-1960s," *Nonproliferation Review*, Summer 2000, hlm. 32.

73 "Sikap pemerintah Indonesia mengenai usul kita untuk menyelenggarakan Konferensi Puncak semua Negara Seluruh Dunia untuk Pelarangan Menyeluruh atas Senjata Nuklir," 19 Oktober-19 November 1964, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01870-01.

penyelenggaraan Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa yang dianggapnya sebagai sebuah aturan yang dibuat di bawah bayang-bayang imperialisme Barat. Walaupun dalam hal ini Beijing memerlukan dukungan Jakarta, Subandrio tampaknya menempuh jalan tengah. Kementerian Luar Negeri di Beijing tampaknya tidak merasa puas dengan "akal bulus" yang digunakan oleh Subandrio:

*Dia [Subandrio] berkolaborasi dengan kaum imperialis dan revisionis dalam konspirasi buat menentang percobaan nuklir Tiongkok. Tampaknya Subandrio bukan saja membuat kita susah, akan tetapi juga menggunakan peluang ini untuk berunding dengan Amerika dan Uni Soviet.<sup>74</sup>*

Sikap Subandrio yang tak jelas itu segera saja berbalik 180 derajat lantaran semangat yang menggebu-gebu Soekarno untuk memiliki senjata nuklir dan kemungkinan akan mendapat dukungan Tiongkok. Lembaga Tenaga Atom Indonesia (sekarang BATAN) didirikan pada Desember 1958. Di bawah persetujuan bilateral rencana kerja sama lima tahun, Amerika menyumbangkan dana sebesar US\$491.000 sebagai bantuan finansial untuk pengembangan tenaga atom bagi tujuan damai. Sebuah reaktor kecil berkekuatan 250 kilowatt untuk tujuan riset dibeli dari Amerika dan dibangun di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1961 dan pada 1964 pembangunannya selesai.<sup>75</sup> Pada saat yang sama Uni Soviet juga menawarkan pembangunan dua reaktor kecil untuk tujuan riset. Reaktor pertama selesai dibangun di Bandung pada November 1962, dan suatu perjanjian untuk memperoleh reaktor lain berkekuatan 2.000 kilowatt ditandatangani pada

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Lihat U. S. Department of State, "Agreement For Cooperation between the Government of the United States and the Government of the Republic of Indonesia Concerning Civil Uses of Atomic Energy," Juni 1960, TIAS no. 4557, United States Treaties and other International Agencies, vol. 11, pt 2; Daniel B. Poneman, "Indonesia," dalam *Nuclear Power and Developing Countries*, ed. James E. Katz & Onkar S. Marwah (Lexington, MA: Lexington Books, 1982), hlm. 183-85; dan dicatat dalam Cornejo, "When Sukarno Sought the Bomb," hlm. 32.

1964.<sup>76</sup> Sejak 1964 hubungan Indonesia dengan blok Barat dan blok sosialis mulai dipenuhi dengan ketegangan. Pada saat itu pulalah Soekarno memperlihatkan sikap ketertarikan yang begitu tinggi untuk mengalihkan penggunaan tenaga nuklir yang terbatas dan demi tujuan damai, menjadi senjata nuklir. Ia yakin bahwa senjata nuklir merupakan kunci untuk meningkatkan status Indonesia di dunia internasional. Tiongkok memperlihatkan ketertarikannya untuk membantu Soekarno tiga bulan setelah percobaan peledakan nuklirnya. Pada Januari 1965, Luo Ruiqing mengatakan dengan gaya bergurau kepada serombongan anggota delegasi Indonesia: "Kami telah melakukan peledakan sebuah bom nuklir. Ini melibatkan teknologi yang ruwet dan maju. Namun, meledakkan bom nuklir tidak berarti bahwa tentara kami telah dilengkapi dengan bom nuklir. Tentu saja Anda sekalian belum meminta senjata nuklir dari kami."<sup>77</sup>

Pada akhir Juli 1965, dalam Kongres ke-36 Muhammadiyah Bandung Soekarno membuat pengumuman, "Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan berhasil membuat bom atom sendiri. Bom atom itu bukan akan kita gunakan untuk mengagresi bangsa atau negara lain, tetapi sekadar untuk menjaga kedaulatan tanah air kita dari gangguan-gangguan tangan jahil; akan kita gunakan kalau kita diganggu atau diserang. Bila kita diganggu, seluruh rakyat Indonesia akan maju ke depan dan menggerakkan seluruh senjata yang ada pada kita." Wartawan Rosihan Anwar menulis tentang pidato Soekarno itu dalam catatan hariannya dengan menambahkan kalimat: "Mustahil sekali Indonesia telah mencapai kemampuan teknologi begitu tinggi sehingga dapat membuat bom atom? Lain halnya bilamana Indonesia

<sup>76</sup> "Hubungan antara para Bandit dengan Indonesia, 1965," *Academia Historica*.

<sup>77</sup> "Catatan Pertemuan Antara Kepala Staf Umum TPR Luo Ruiqing dan Delegasi Militer Indonesia (tentang Kunjungan di Masa Depan, Kemungkinan Bantuan Peralatan Tiongkok dan Pertukaran Intelijen," 24 Januari 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01910-07.

mendapat bantuan dari RRT untuk membuat bom atom sebab memang RRT sudah meledakkan bom nuklirnya. Mungkinkah juga soal pembuatan bom atom ini dibicarakan secara rahasia dalam pertemuan-pertemuan yang begitu banyak antara Presiden dan Dr. Subandrio dengan Zhou Enlai dan Chen Yi? Orang hanya dapat menduga-duga tetapi tidak [tahu] dengan persis."<sup>78</sup> Mungkin diskusi-diskusi mengenai bantuan Tiongkok kepada Indonesia sehubungan dengan teknologi nuklir telah berlangsung dalam paruh pertama tahun 1965. Soekarno mungkin saja membuat pengumuman terbuka tentang ambisi nuklir Indonesia itu setelah mendapat jaminan mengenai dukungan Beijing.

Ketika Chen Yi datang berkunjung sehubungan dengan HUT Kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1965, sikap Subandrio sangat berlainan dengan apa yang dikatakannya sembilan bulan sebelumnya. Subandrio mengatakan kepada Chen Yi:

*Saya baru sadar Indonesia melakukan kesalahan dengan turut menandatangani Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir di Moskow pada 1963. . . Satu-satunya cara untuk mencegah perang nuklir dan melindungi keamanan tanah air adalah dengan cara lebih banyak lagi negara-negara Asia-Afrika memiliki senjata nuklir. Tujuannya adalah untuk mematahkan monopoli teknologi nuklir dari imperialisme Barat dan Uni Soviet. Indonesia benar-benar berkeinginan untuk membuat bom nuklirnya sendiri. Dan dalam hal ini Indonesia berharap agar Tiongkok dapat memberi dukungan seperti halnya dengan bantuan dalam bidang pembangunan ekonomi dan persenjataan."<sup>79</sup>*

Setelah Chen Yi menyatakan dukungan dan dorongan, Subandrio merencanakan pengiriman sebuah delegasi ke

78 H. Rosihan Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahalah Politik 1961-1965* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 358.

79 "Kunjungan Wakil Perdana Menteri Chen Yi dan Pertemuannya dengan Presiden Soekarno, dsb . . ." 16 Agustus 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01324-03.

Tiongkok buat mendiskusikan tentang hal itu secara lebih rinci.<sup>80</sup> Ketika ia bertemu lagi secara pribadi dengan Chen Yi beberapa hari kemudian, jaminan yang lebih eksplisit disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok itu. Ketika Subandrio mengetengahkan isu mengenai transfer teknologi, Chen Yi berkata, "Dalam hal ini kami dapat memberi bantuan. Apabila kami tidak memberikan bantuan, artinya kami bukan teman sejati. Menurut pengetahuan kami, Anda punya landasan dasar untuk itu. Membuat sebuah bom nuklir bukan satu pekerjaan yang tidak mungkin, dan kami sudah melakukannya dengan sempurna. Kedua pihak dapat membicarakan tentang hal ini secara rahasia."<sup>81</sup>

Seiring dengan kesesuaian paham sebagai hasil pembicaraan Chen Yi-Subandrio, sebuah Kelompok Energi Atom yang berafiliasi dengan suatu delegasi ekonomi yang cukup besar tiba di Tiongkok pada 21 September 1965. Kelompok Energi Atom terdiri dari personil militer dan ilmuwan, termasuk ke dalamnya Marsekal Muda Sutopo dan mantan Direktur BATAN Djali Ahimsa. Permohonan yang diajukan kelompok itu adalah:

- Kunjungan ke berbagai laboratorium dan mempelajari penelitian yang relevan;
- Kunjungan ke beberapa laboratorium kimia termasuk laboratorium dimana analisis atas materi mentah seperti uranium, dan mempelajari prosedur dalam memproses minyak bekas;
- Mengamati tentang bagaimana energi atom digunakan untuk tujuan militer;
- Kunjungan ke beberapa reaktor nuklir yang telah dioperasikan, termasuk yang digunakan untuk

80 *Ibid.*

81 "Pertemuan Rahasia antara Wakil Perdana Menteri Chen Yi dengan Wakil Perdana Menteri Indonesia Subandrio," 27 Agustus 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01323-02.

tujuan-tujuan riset, sumber energi, dan tujuan-tujuan lainnya; dan

- Mengirim anggota staf untuk melakukan penelitian bersama para pakar Tiongkok.<sup>82</sup>

Menurut Djali Ahimsa, tujuan tak tertulis dari perjalanan itu adalah untuk menerima bantuan terbatas Tiongkok kepada proyek nuklir Indonesia. Akan tetapi yang paling penting lagi adalah membawa pulang plutonium dari Tiongkok yang menjadi bagian dari perjanjian antara Soekarno dengan para pemimpin tertinggi Tiongkok. Djali Ahimsa yakin, dengan adanya plutonium dari Tiongkok, para peneliti Indonesia akan mampu membuat bom nuklir. Pada saat itu, kedua pihak juga telah mengatur waktu untuk kunjungan para ilmuwan nuklir Tiongkok ke Indonesia pada 1966 dengan tujuan memberikan dukungan teknis. Universitas Qinghua dan ITB tengah merundingkan kemungkinan kerja sama pada September 1965. Namun, sampai sebelum G30S terjadi tak satu pun staf teknis Tiongkok yang datang.<sup>83</sup>

Selama kunjungan ke Beijing, Grup Energi Atom mengunjungi reaktor riset nuklir di Universitas Qinghua, laboratorium fisika nuklir di Universitas Peking dan Institut Energi Atom No. 1 dan No. 2 milik Institut Energi Atom sambil berdiskusi dengan para ilmuwan di badan-badan ilmiah tersebut. Tampaknya rombongan itu tidak mengunjungi satu pun dari situs-situs nuklir militer. Pada 22 September Zhou Enlai bertemu dengan rombongan itu dan mengatakan:

*Tujuan kunjungan ini adalah mencari kemungkinan pembangunan proyek dasar nuklir untuk tujuan damai [di Indonesia], untuk penelitian ilmiah industri, pendidikan dan*

82 "Matlamat tentang Penyambutan Kelompok Energi Nuklir dari Delegasi Ekonomi Indonesia," 21-28 September 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01323-02.

83 Wawancara dengan Djali Ahimsa, Jakarta, 28 April 2013.

*lain-lain. Hal yang mengacu pada tujuan kerja sama lebih luas, keputusan harus dibuat oleh para pemimpin tertinggi kedua negara kita. Begitu partai dan pemerintah membuat keputusan, Wakil Perdana Menteri Chen Yi dan saya akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soekarno pada waktu bertemu di Konferensi Asia-Afrika.<sup>84</sup>*

Pada malam hari tanggal 30 September 1965, hanya beberapa jam sebelum G30S terjadi di Indonesia, Mao Zedong dan Liu Shaoqi bertemu dengan para wakil delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang diundang ke Beijing untuk menghadiri perayaan Nasional RRT. Para politisi Indonesia yang hadir pada pertemuan tersebut termasuk Chairul Saleh, Ketua MPR dan Ali Sastroamidjojo, Ketua PNI. Cukup banyak bagian dari pertemuan itu yang dipusatkan pada isu-isu mengenai senjata nuklir:

*Ketua Mao: . . . Dewasa ini dunia tidak dalam masa damai. Karenanya kita memerlukan kekuatan militer, dan ada tambahan lain lagi, bom atom. Apakah kalian mau membuat bom atom? Chairul Saleh: Kami ingin.*

*Ketua Mao: Kalian harus membuatnya.*

*Chairul Saleh: Kami tidak setuju kalau kepemilikan persenjataan nuklir hanya didominasi oleh beberapa kekuatan besar saja.*

*Ketua Mao: Saya setuju itu. Dua negara besar di atas dunia ini menginginkan monopoli atas kekuatan nuklir, tapi kita tak mau mendengarkan mereka. Kami masih membuat senjata nuklir. Namun, kami sekarang ini masih dalam tahap awal. Amerika mengirimkan pesan yang mengancam bahwa mereka akan meledakkan reaktor nuklir kami. Itu akan merupakan akhir dunia. Ada orang mengatakan, reaktor*

84 "Catatan Pertemuan antara Perdana Menteri Zhou Enlai dengan Delegasi Ekonomi Indonesia," 22 September 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01321-07. Konferensi Asia-Afrika (KAA) ke-2 pada awalnya dijadwalkan akan dibuka di Aljazair pada Juni 1965, tapi dibatalkan karena terjadinya kudeta di negeri yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Sebelum G30S terjadi, Tiongkok dan Indonesia sedang membicarakan untuk mengundurkan penyelenggaraan KAA.

bisa saja diledakkan, akan tetapi cita-cita tak akan bisa dihancurkan. Walaupun kalau jajaran pertama reaktor nuklir dihancurkan, orang yang punya cita-cita bisa membangun jajaran kedua.

*Chairul Saleh:* Ya, betul. Reaktor-reaktor baru bisa dibuat.

*Ketua Mao:* Itu kata-kata Menteri Pertahanan Amerika.

*Chairul Saleh:* Teknologi tidak bisa lagi dimonopoli oleh kaum imperialis.

*Ketua Mao:* Ya betul. Tidak ada lagi monopoli. Semua [teknologi] harus terbuka. Semua [negara] harus dapat berkomunikasi [dengan bebas].

*Chairul Saleh:* Itulah sebabnya kami sangat berbahagia. Ketua Mao baru saja mengatakan bahwa Tiongkok masih berada di tahap awal dalam pengembangan teknologi nuklir. Tapi untuk kami, kemampuan Tiongkok untuk menciptakan bom atom merupakan peristiwa yang sangat penting. Kami sangat terdorong oleh peristiwa ini baik secara spiritual maupun material. Peristiwa ini akan mendorong lebih jauh lagi seluruh Kekuatan yang Baru Muncul untuk membangun dunia baru.

*Ketua Mao:* Sebagai langkah pertama kalian harus membangun petanian dan industri ringan. Dan kalian perlu menemukan bahan mentah untuk membuat bom atom. Apakah itu ada di negeri kalian?

*Chairul Saleh:* Saya yakin ada. Survei geografis kami belakangan ini telah menunjukkan tanda-tanda positif. Sekarang kami sedang giat-giatnya melakukan survei dan memanfaatkan sumber-sumber alam.

*Ketua Mao:* Apakah kalian punya tambang besi dan batubara? Sumber-sumber alam di negeri kalian jauh lebih kaya daripada yang ada di negeri kami. Kalian memiliki jumlah sangat besar minyak dan karet dan keduanya merupakan benda-benda yang jarang didapat.

*Chairul Saleh:* Itu betul. Karenanya kami mengirim delegasi ekonomi ke Tiongkok dengan tujuan belajar dari Tiongkok

dan untuk menumbuhkan kerja sama antara kedua negara. Pengembangan industri besi dan industri berat merupakan tugas penting bagi Indonesia. Kami tak memiliki industri-industri pembuatan besi dan baja. Sehubungan dengan itu kami bermaksud untuk segera membangun industri tersebut, kalau saja Tiongkok sudi membantu kami.

*Ketua Mao:* Ini bisa dilakukan. Jelas kami akan membantu kalian tanpa syarat.<sup>85</sup>

Ada semacam ambiguitas dalam tawaran Mao dengan pemakaian istilah "tanpa syarat" itu. Dalam konteks percakapan itu tawaran Mao dapat diinterpretasikan baik secara sempit (industri baja) atau secara luas (yang berarti termasuk bantuan nuklir). Fakta bahwa Mao dengan secara terbuka mendukung gagasan Indonesia untuk memiliki teknologi dan senjata nuklir sebelum G30S meletus merupakan suatu hal penting tapi juga penuh dengan teka-teki. Dalam berbagai percakapan dengan para tamu asing Mao seringkali memperlihatkan gaya bicara yang sukar sekali diduga. Karenanya tidak mudah untuk mengerti dengan tepat apa yang dimaksudkannya dengan memilih topik yang begitu sensitif pada waktu yang sensitif pula.

Akan tetapi, yang jelas, G30S secara fundamental telah mengubah arah pencaharian Soekarno untuk memiliki kekuatan nuklir dan juga kemungkinan Tiongkok untuk memberikan bantuan kepada Indonesia. Tadinya, Zhou Enlai berencana untuk mengadakan dialog yang lebih mendalam dengan Kelompok Energi Atom pada 2 Oktober 1965 untuk membicarakan rincian bantuan Tiongkok kepada Indonesia.<sup>86</sup> Akan tetapi, karena perubahan politik di Indonesia pertemuan itu dipindahkan ke kediaman Zhou Enlai di Kota Terlarang.

85 "Catatan Pertemuan antara Ketua Mao dan Ketua Liu Shaoqi dengan Delegasi Indonesia," 22 September 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01917-02.

86 "Catatan Pertemuan antara Perdana Menteri Zhou Enlai dengan Delegasi Ekonomi Indonesia," 30 September 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01321-07.

Ia mengatakan kepada para anggota kelompok tersebut untuk menunggu dan melihat perkembangan di dalam negeri mereka. Ketika Djali Ahimsa menanyakan tentang kemungkinan mengunjungi pabrik pengayaan uranium di Chengdu, Tiongkok Barat, Zhou menjawab ia akan berusaha untuk mengaturnya. Namun, tidak ada kelanjutan dari permohonan tersebut.<sup>87</sup>

### Bantuan Medis Tiongkok untuk Soekarno

Di samping bantuan militer dan nuklir, pada awal dasawarsa 1960-an Tiongkok telah menyumbang bantuan medis untuk Soekarno. Dokumen pemerintah Tiongkok mencatat kondisi fisik Soekarno tidak seburuk seperti yang dispekulasikan oleh para sarjana Barat. Sebelum G30S, baik PKI maupun Beijing memperkirakan Soekarno akan segera wafat. Ada kemungkinan Soekarno telah berkonsultasi dengan para dokter Tiongkok sejak awal 1960-an. Dalam bulan Desember 1961, duta besar Indonesia di Tiongkok, Sukarni, bertemu dengan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luan Negeri Chen Yi. Pada pertemuan tersebut duta besar Sukarni mengatakan Soekarno telah menyembunyikan fakta kepada Amerika bahwa ia mencari bantuan dari dokter-dokter Tiongkok. Akan tetapi sekarang Amerika sudah tahu dan telah mengajukan protes.<sup>88</sup> Bantuan medis Tiongkok yang paling intensif dan kontroversial terjadi antara November 1964-September 1965. Itu terjadi ketika tim medis Tiongkok yang melakukan tugasnya dengan cara *high profile* merawat Soekarno dengan diagnosis, resep obat, dan

87 Wawancara dengan Djali Ahimsa, Jakarta, 18 April 2013.

88 "Inti Laporan tentang Pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Chen Yi dengan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Sukarni," 22 Desember 1961, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01768-04.

perawatan medis tradisional Tiongkok seperti akupunktur dan obat herbal.<sup>89</sup>

Beijing kemudian mulai memberikan perawatan medis yang sistematis kepada presiden Indonesia itu, ketika laporan dan rumor mengenai kesehatan Soekarno yang tengah memburuk tersebar luas pada akhir 1964. Menjelang akhir Oktober 1964, duta besar Tiongkok untuk Indonesia, Yao Zhongming memberi laporan ke Beijing mengenai isu tersebut. Kata Yao, "media Barat melaporkan tentang kemungkinan Soekarno mengundurkan diri karena kesehatannya. Akan tetapi, tidak ada pemberitaan mengenai hal itu di kalangan media di Indonesia. Juga isu ini tidak dikemukakan oleh kawan-kawan kita [PKI]."<sup>90</sup> Informasi tentang kesehatan Soekarno dibocorkan secara rahasia kepada media oleh para dokter di Wina. Dokter-dokter itu menemukan batu di ginjal kanan presiden dan yakin Soekarno akan meninggal kalau batu ginjal itu tak dikeluarkan dengan operasi. Pada November 1964 suatu tim dokter, dipimpin seorang urolog terkemuka, Dr. Wu Jieping, datang di Indonesia dan melakukan pemeriksaan menyeluruh atas kesehatan Soekarno. Tim medis Tiongkok itu membantah diagnosis dari Wina. Dr. Wu dan timnya berkesimpulan, problem kardiovaskular-lah dan bukan batu ginjal yang harus segera disembuhkan. Program perawatan tim dokter Tiongkok yang didesain untuk Soekarno ternyata sangat efektif. Tim itu kemudian meninggalkan Indonesia pada awal Januari 1965 setelah kondisi Soekarno stabil.<sup>91</sup>

89 Tampaknya Soekarno sangat menyukai kapsul berisi obat herbal dari Tiongkok. Ia cenderung meminumnya dengan sedikit overdosis (resepnya lima kapsul sekali minum, tapi Soekarno minum enam kapsul). Ini membuat para dokter Tiongkok terkejut. "Resep obat untuk Soekarno," 23 April 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01331-01.

90 "Kemungkinan Terjadinya Kup di Indonesia," 30 Oktober-20 Desember 1964, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01233-06.

91 "Perawatan Tim Medis Kita atas Soekarno dan Kondisi Kesehatan Presiden Soekarno," 22 November 1964, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01234-01

Dalam bulan-bulan antara musim dingin 1964 dan musim semi 1965, kemajuan kesehatan Soekarno telah memperkuat kepercayaannya terhadap tim medis Tiongkok. Tim medis itu telah menjadi perawat kesehatannya mulai awal 1965 sampai terjadinya G30S. Ia berpendapat nasihat para dokter Wina agar ia menjalani operasi tak disetujui dan malahan tak diterimanya. Soekarno sangat gembira karena diagnosis tim dokter Tiongkok tepat—ia tidak usah dioperasi untuk mengobati batu ginjalnya. Tambahan lagi pada April 1965 ia mendapat tahu bahwa informasi mengenai kesehatannya telah dibocorkan para dokter di Wina itu. Jadi baik dalam hal teknis maupun politik tim dokter Tiongkok merupakan pilihan yang sangat dapat dipercaya bagi presiden Indonesia itu.<sup>92</sup>

Tim dokter Tiongkok merawat Soekarno ketika ia mendapat serangan hebat *cerebral vasospasm* pada Agustus 1965. Itu katanya telah menyebabkan keributan pada situasi politik Indonesia dan konon menimbulkan ketegangan menjelang G30S. Pagi hari 4 Agustus 1965 begitu bangun dari tidurnya Soekarno merasa pusing-pusing, vertigo, dan menjadi tak berdaya pada jam 8.00 pagi. Serangan itu disertai mual, muntah-muntah, dan berkeringat. Pada jam 10.00 pagi tim dokter Tiongkok diminta datang ke Istana Negara. Dalam laporan pertamanya ke Beijing tim dokter Tiongkok menulis, "Sampai sekarang masih belum jelas apakah kondisi kesehatan presiden akan memburuk. Sekarang kami memberikan perawatan kepadanya dan tidak ada tanda-tanda presiden akan lumpuh. Mohon kawan Aidit diberi tahu."<sup>93</sup> Dalam sebuah telegram yang dikirim beberapa jam kemudian tim dokter itu menulis, "Kami telah

92 "Resep Obat untuk Soekarno," 23 April 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01331-01.

93 "Tentang Penyakit Otak Presiden Soekarno," 4 Agustus 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01331-01.

mendiagnosis Soekarno, dan dia menderita penyakit *Meniere*. Sampai sekarang belum timbul pembentukan *thrombus* yang disebabkan oleh *cerebral hemorrhage*. Kami mengharapkan beliau akan sembuh dalam waktu singkat, akan tetapi kami juga harus siap untuk kemungkinan pembentukan *thrombus* dan komplikasi yang disebabkan oleh itu di jantung dan ginjalnya." Tim dokter meminta agar Beijing mengirim seorang neurolog dari Tiongkok untuk diagnosis lebih rinci.<sup>94</sup>

Sakitnya Soekarno dengan tiba-tiba membuat para pemimpin Tiongkok terhenyak. Pada 5 Agustus pagi Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan instruksi kepada Duta Besar Yao Zhongming untuk mengunjungi Soekarno dan memperhatikan dengan saksama perkembangan kondisinya. Yao juga menerima instruksi untuk "selalu melapor balik ke Kementerian Luar Negeri." Pada siang hari pukul 13.30 tanggal yang sama Zhou Enlai memberikan perintah kepada Kementerian Kesehatan untuk mempelajari laporan mengenai kesehatan Soekarno seperti yang dilaporkan tim dokter Tiongkok sehari sebelumnya. Kementerian Kesehatan juga diperintahkan untuk menyiapkan obat yang diperlukan dan memilih dua orang urolog terbaik Tiongkok yang akan terbang ke Jakarta bersama Ketua PKI Aidit keesokan harinya. Pada waktu itu, Aidit sedang mengunjungi Beijing dan tadinya dijadwalkan untuk berangkat ke Hanoi pada 7 Agustus. Setelah diberi tahu Zhou Enlai tentang kondisi kesehatan Soekarno, ia membatalkan rencana untuk ke Vietnam dan kembali ke Indonesia pada 6 Agustus.<sup>95</sup>

Pada malam hari tanggal 5 Agustus setelah persiapan keberangkatan kembali Aidit ke Jakarta selesai, Kementerian

94 "Kondisi Penyakit Presiden Soekarno," 4 Agustus 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01330-01.

95 "Kondisi Kesehatan Presiden Soekarno Membaik pada tanggal 5," 5 Agustus 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01330-01.

Luar Negeri Tiongkok menerima kabar yang membuat tenang. Tim medis Tiongkok melaporkan kondisi Soekarno sejak pagi itu bertambah baik dan dia "bisa bicara dan tertawa seperti biasanya dan menikmati makan paginya." Tim medis Tiongkok menarik kesimpulan serangan *celebral vasospasm* telah dapat diatasi dan tidak akan ada lagi *sequela* dalam jangka panjang. Mengenai prospek masa depan kesehatan presiden, para dokter Tiongkok itu tidak begitu optimis. "Serangan itu menunjukkan *arteriosclerosis* telah berdampak buruk terhadap seluruh tubuhnya, termasuk jantung, ginjal, dan otak. Kondisi kesehatannya untuk jangka panjang mengkhawatirkan."<sup>96</sup>

Seperti yang dikatakan di depan, para dokter Tiongkok sangat mengkhawatirkan kesehatan Soekarno. Namun, Soekarno sendiri kelihatannya yakin bahwa kesehatannya telah pulih secara penuh dan kembali bekerja. Tampaknya, apa yang dilakukan Soekarno merupakan keputusan strategis karena isu tentang kesehatannya telah menjadi topik sensitif di tengah suasana ketegangan lingkungan politik di Indonesia. Pada 6 Agustus Soekarno memberi tahu para dokter Tiongkok bahwa ia tak merasa tidak enak badan lagi dan siap untuk mempersiapkan pidato yang akan diampaikannya pada hari kemerdekaan. Dan pada 9 Agustus ia kembali secara penuh mengerjakan tugas-tugas rutusnya. Pada 15 Agustus Chen Yi, yang diundang ke Jakarta dalam rangka perayaan hari kemerdekaan bertemu dengan Soekarno. Dalam pertemuan tersebut Chen Yi menyarankan kepada Soekarno untuk memperhatikan kesehatannya. Chen Yi juga menasihatkan agar Soekarno, apabila diperlukan, meminta orang lain untuk membacakan pidatonya.<sup>97</sup> Akan tetapi, demi mencegah

<sup>96</sup> Ibid.

<sup>97</sup> "Kunjungan Wakil Perdana Menteri Chen Yi ke Indonesia dan Pertemuan dengan Presiden Soekarno dan sebagainya," 16 Agustus 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01324-03.

terjadinya kekacauan politik, pada 17 Agustus 1965 Soekarno sendirilah yang menyampaikan pidatonya itu. Huang Shuhai, penerjemah bahasa Indonesia Chen Yi, juga hadir pada peristiwa rutin tahunan itu. Menurut pengamatannya Soekarno kelihatan sehat dan penuh semangat baik pada waktu berpidato maupun ketika menjadi tuan rumah dalam menyambut Chen Yi.<sup>98</sup>

Namun, berbeda dengan semakin baiknya kesehatan Soekarno, tim kesehatan Tiongkok merasa frustrasi dengan penolakan Soekarno untuk mulai beralih ke gaya hidup yang lebih menyehatkan. Karena serangan *cerebral vasospasm* dipicu oleh "suasana hati yang terombang-ambing karena adanya konflik domestik", para dokter Tiongkok menyarankan Soekarno untuk "mengurangi beban kerja dan menerapkan pembatasan terhadap kehidupan seksualnya."<sup>99</sup> Namun, nasihat ini tidak pernah didengar Soekarno. Pada 20 Agustus 1965 tim medis itu melaporkan bahwa Soekarno "menganut sikap yang sama seperti dulu terhadap pengobatan dan kehidupan seksual... Sejak sore hari tanggal 16 Agustus ia telah berhenti minum obat *tranqualizer* dan obat untuk mengatasi tekanan darah tinggi." Oleh karenanya, tim medis memutuskan untuk meninggalkan Indonesia selama kondisi kesehatan sang pasien terus membaik tapi tidak kooperatif.<sup>100</sup>

Tapi, bisa saja keputusan tim untuk meninggalkan Indonesia juga sebagai dampak kekhawatiran Beijing. Para pemimpin Tiongkok barangkali khawatir akan pemunculan implikasi politik dari hubungan antara kehadiran para dokter Tiongkok dengan sakitnya Soekarno secara mendadak pada awal Agustus. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mene-

<sup>98</sup> Wawancara dengan Huang Shuhai, Beijing 17 Juli 2009.

<sup>99</sup> "Penyakit Presiden Soekarno dan Pengobatan Tim Medis Kita," 5 Agustus 1965.

<sup>100</sup> "Penyakit Presiden Soekarno dan Pengobatan Tim Medis Kita, 20 Agustus 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01330-01

kankan "kita harus membiarkan dokter-dokter pribadi Soekarno, Dr. Suharto dan Dr. Lauw Ing Tjhiong, memegang kendali utama. Kita bisa memainkan peran pembantu kalau mendapat persetujuan dari Soekarno sendiri."<sup>101</sup> Akan tetapi, bantuan medis Beijing itu sendiri kepada Soekarno pada kenyataannya sangat rawan terhadap kecurigaan dan tuduhan. Pada tahun 1990-an sebuah majalah berbahasa Tionghoa yang berbasis di Hong Kong mengatakan Zhou Enlai menggunakan diagnosis keliru dari Dr. Wu itu. Zhou punya firasat kondisi kesehatan Soekarno sedang kritis dan informasi itu kemudian disampaikan kepada Aidit. Oleh sebab itulah Aidit memutuskan untuk mengambil tindakan terlebih dahulu terhadap Angkatan Darat Indonesia. Dr. Wu berpendapat tuduhan-tuduhan seperti itu "menggelikan." Seperti yang dikatakannya, "Saya tidak pernah menyampaikan laporan itu kepada Zhou Enlai. Kondisi kesehatan Soekarno tidak seburuk seperti yang dides-desuskan. Rentang hidupnya membuktikan itu. Saya hanya bisa bersikap tak peduli terhadap fitnah-fitnah semacam itu."<sup>102</sup>

### Hubungan antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Komunis Indonesia

Pendekatan Tiongkok kepada Indonesia dapat dibuktikan dengan tawaran bantuan senjata ringan, materi, dan teknologi nuklir, serta perawatan medis untuk presiden. Karenanya juga masuk akal apabila kita juga memunculkan pertanyaan kemungkinan pimpinan RRT telah membantu para kameradnya di Indonesia mendesain perencanaan G30S. Paragraf berikut ini memberi kesan para pemimpin Tiongkok tahu tentang rencana PKI untuk mencegah jenderal-jenderal

101 "Penyakit Presiden Soekarno dan Pengobatan Tim Media Kita," 5 Agustus 1965.

102 Deng Li, Wu Jieping zhuan [Biografi Wu Jieping] (Hangzhou: Zhejiang renmin chubanshe, 1999). Dikutip dalam Zhou Nanjing & Kong Zhiyuan, eds. *Sujianuo zhongguo yindunixiya huaren* [Soekarno, Tiongkok, dan etnis Tionghoa Indonesia] (Hong Kong: Hong Kong Social Science Press, 2003), hlm. 419-440.

kanan Indonesia bergerak buat mengambil-alih kekuasaan. Namun, Beijing selalu menjauhkan diri dari rencana G30S tersebut.

Sudah sejak pertengahan 1963 para pemimpin tertinggi Tiongkok merasa situasi Indonesia penuh dengan ketegangan dan sudah matang untuk terjadinya transisi kekuasaan. Dalam kata-kata Zhou Enlai masalah yang paling kritis adalah:

*Nasution, dengan dukungan Amerika Serikat dan pemerintah Chiang Kai-shek di Taiwan tengah berusaha dengan segala cara untuk menggulingkan dan menggantikan Soekarno. Ini adalah pertarungan antara hidup dan mati yang akan berlangsung terus. Apapun sikap Soekarno, [revolusi Indonesia] akan lahir. Dalam era baru sejarah perjuangan Indonesia menentang imperialisme dan feodalisme, konfigurasi baru kekuasaan akan muncul. Peristiwa yang berlangsung begitu cepat itu tergantung pada kekuatan relatif dan strategi PK [untuk mengatasinya]. Saya yakin PKI memiliki pandangan ke depan dan telah membuat persiapan.*<sup>103</sup>

Pada 5 Agustus 1965 Aidit dengan didampingi istrinya, Tanti dan Wakil Sekretaris PKI Yusuf Adjitorop, mengadakan pertemuan dengan Mao Zedong dan para pemimpin tertinggi RRT lainnya. Dari pihak RRT hadir Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Peng Zhen, dan Chen Yi. Dalam pertemuan tersebut Zhou melaporkan kepada Mao tentang kemunduran kesehatan Soekarno (dia mendapat serangan hebat *cerebral vasospasm* dua hari sebelum itu). Pembicaraan juga menyentuh soal pembatalan rencana perjalanan Aidit dan kembali lebih awal ke Indonesia. Berikutnya kedua pihak berbicara tentang Angkatan Darat Indonesia.

103 "Tentang Pertahanan dan Perlindungan Diri selama Kerusuhan Anti-Tionghoa di Indonesia, dan Penyebaran Tindakan Darurat Kedutaan kita di Indonesia," 23 Juni 1963, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01826-03.

Mao: Menurut saya golongan sayap kanan bertekad kuat untuk merebut kekuasaan. Apakah kalian juga punya tekad kuat?

Aidit : [sambil menganggukkan kepala] Kalau Soekarno meninggal, itu adalah masalah siapa yang berada di atas angin.

Mao: Saya sarankan anda tidak bepergian ke luar negeri kelewat sering. Anda bisa meminta orang nomor dua [yakni wakil anda] untuk pergi.

Aidit: Mengenai sayap kanan, mereka mungkin saja menempuh dua macam cara: Pertama, mereka bisa saja menyerang kita. Kalau mereka mengambil tindakan seperti itu, kita punya alasan untuk menyerang balik. Kedua, mereka bisa saja menggunakan cara yang moderat dengan membentuk pemerintahan Nasakom. Tanpa Soekarno, sangat mudah bagi sayap kanan untuk merebut dukungan dari mereka-mereka yang ada di tengah untuk mengisolasi kita. Kalau skenario terakhir ini [terjadi] akan sangat sukar bagi kita untuk menghadapinya. Namun, apa pun yang terjadi kita harus berhadapan dengan mereka. Amerika menyarankan Nasution untuk menunggu dengan sabar. Karena walaupun Soekarno wafat, ia [Nasution] harus fleksibel ketimbang [mengambil langkah] untuk melakukan kudeta. Ia menerima saran yang datang dari Amerika itu.

Mao: Itu tak dapat dipercaya. Situasi dewasa ini telah berubah.

Aidit: Dalam skenario awal, kita akan membentuk sebuah komite militer. Sebagian besar dari anggota komite tersebut akan terdiri dari orang-orang sayap kiri, tapi jugaharus memasukkan beberapa elemen tengah. Dengan cara ini kita dapat membuat musuh kita kebingungan. Musuh-musuh kita akan tak merasa yakin tentang warna dari komite tersebut dan karenanya para komandan militer yang bersimpati kepada sayap kanan tak akan segera menentang kita. Ketua komite militer itu harus anggota rahasia partai kita, tapi harus mengidentifikasi diri sebagai orang yang netral. Komite militer ini tak boleh berkuasa kelewat lama, karena kalau tidak, orang baik akan berubah jadi jahat. Setelah

komite itu terbentuk, kita perlu mempersenjatai buruh dan tani dalam waktu yang tepat.<sup>104</sup>

Menurut catatan mengenai pertemuan itu Mao mengalihkan percakapan ke pengalaman dia bernegosiasi dengan Kuomintang di Chongqing. Mengingat itu menyentuh latar belakang sejarah Perang Saudara Tiongkok, ada kemungkinan Mao menyampaikan nasihat terselubung kepada Aidit untuk siap baik berunding maupun perjuangan bersenjata. Sikap pimpinan tertinggi Tiongkok tetap saja tak jelas. Tapi ada bukti bahwa Beijing mendapat bisikan tentang rencana Aidit dan paling tidak mereka tidak berkeberatan terhadap itu.

Akan tetapi, tampaknya tak mungkin kalau Beijing tahu akan *timing* yang tepat atau turut serta dalam perencanaannya. Memang 1 Oktober 1965 barangkali merupakan hari yang menegangkan bagi para pemimpin Tiongkok. Mereka harus memusatkan perhatian pada perayaan Hari Nasional RRT padahal pada waktu yang sama terjadi perubahan drastis di Indonesia. Kabar pertama tentang G30S tiba di Beijing dari media asing dan bukan dari kedutaan besar di Jakarta. Rupanya begitu menerima kabar tentang peristiwa itu Beijing mengirim telegram ke kedutaannya di Jakarta untuk meminta klarifikasi. Namun, jawaban baru sampai di Beijing lebih dari satu hari kemudian.<sup>105</sup> Dengan kata lain, dalam 24 jam pertama setelah G30S terjadi, Beijing benar-benar kehilangan kontak dengan kedutaannya di Jakarta. Hanya Associated Press, Agence France-Presse, dan Reuter menjadi

104 "Pertemuan Ketua Mao dan Delegasi PKI," Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 5 Agustus 1965.

105 "Catatan Pertemuan Perdana Menteri Zhou Enlai dengan Delegasi Sekolah Staf AURI," 3 Oktober 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01687-02. Zhou mengatakan kepada Delegasi Sekolah Staf AURI itu, "Kami mengirim telegram ke Kedutaan Tiongkok di Jakarta dua hari lalu, tapi kami masih belum menerima balasan." Tapi, dalam pembicaraan dengan Chairul Saleh, ia mengatakan beberapa telegram terkirim dan sampai pada 2 Oktober 1965. Lihat "Catatan Pertemuan Kedua dan Ketiga dengan Delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (mengenai Situasi Domestik di Indonesia dan Konferensi Asia-Afrika)1-4 Oktober, 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01917-01.

sumber-sumber yang diperoleh Beijing. Pada pertemuan resmi pertama dengan para tamu Indonesia setelah G30S terjadi, Zhou Enlai mengatakan kepada Chairul Saleh, Ali Sastroamidjojo, Jenderal Wilujo Puspojudo, dan duta besar DDjawoto, "kami baru saja menerima sebagian kecil dari kabar-kabar yang datang dari luar negeri. Menurut laporan itu suatu Dewan Jenderal telah melakukan kudeta yang gagal dan Penjaga Istana Kepresidenan telah menangkap mereka yang terlibat . . . Presiden selamat dan pasukan Penjaga Keamanan Istana telah membentuk 'Dewan Revolusi' untuk menguasai keadaan" Pada 2 Oktober 1965 beberapa telegram akhirnya dapat tembus melalui Beijing dan Jakarta, termasuk satu dari Kedutaan RRT di Jakarta yang memastikan tentang keselamatan Soekarno. Namun, komunikasi tetap saja terputus-putus dan sinyal radio dari Kedutaan Tiongkok tetap mendapat gangguan, dan hubungan dengan Kantor Xinhua di Jakarta tetap terblokir.<sup>106</sup>

Dalam pembicaraan dengan Chairul Saleh pada 1 Oktober interpretasi Zhou Enlai mengenai G30S sangat mengundang keingintahuan. Zhou mengatakan, peran Dewan Revolusi adalah reaksi terhadap kup yang dilakukan Dewan Jenderal dan pihak yang memulai G30S. Dalam sebuah pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri Korea Utara Ri Ju-yeon, Chen Yi mengatakan, pemimpin G30S, Untung, "mengikuti perintah Soekarno." Selanjutnya ia menerangkan, "Ada pendukung Soekarno dan ada juga mata-mata dari sayap kanan Angkatan Darat di dalam PKI. Para pendukung Soekarno dan anggota-anggota PKI juga ada di dalam Angkatan Darat. Sulit mengikuti apa yang tengah terjadi."<sup>107</sup> Zhou Enlai dan Chen

106 "Catatan Pertemuan Kedua dan Ketiga dengan Delegasi MPR dari Indonesia (mengenai keadaan domestik di Indonesia dan Konferensi Asia-Afrika," 1-4 Oktober 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01917-01.

107 "Pertemuan Kedua Perdana Menteri Zhou Enlai dan Wakil Perdana Menteri Chen Yi dengan Wakil Perdana Menteri Korea Utara," 11 November 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 106-01476-06.

Yi juga hadir dalam diskusi dengan Mao pada 5 Agustus itu. Karenanya mungkin saja kedua pemimpin Tiongkok itu berusaha untuk melindungi PKI, dan juga PKT sendiri dengan cara menyembunyikan fakta bahwa Beijing telah diberi tahu terlebih dahulu mengenai rencana Aidit. Boleh jadi, bahkan mungkin bisa jadi para pemimpin Tiongkok terkejut dengan begitu cepatnya PKI beraksi. Beijing mungkin saja telah mengharapkan adanya kolaborasi antara PKI dan Soekarno dalam masa yang lebih panjang. Itu akan memungkinkan PKI memiliki waktu lebih lama sampai terjadinya militerisasi yang menyeluruh. Jadi, cara yang dipakai PKI untuk bertindak dengan segera mungkin saja telah menyebabkan keadaan menjadi mengkhawatirkan bagi Beijing. Pada 2 Oktober lingkaran para penyusun kebijakan luar negeri di Beijing telah mengetahui bahwa Dewan Revolusi telah gagal dan Soeharto telah menguasai keadaan.<sup>108</sup>

Tampaknya sejak waktu setelah G30S sampai akhir Oktober 1965, para pemimpin Tiongkok masih mengharapkan munculnya sebuah pemerintah progresif condong ke kiri yang akan terus bertopang pada aliansi Soekarno-PKI. Beijing sangat mencita-citakan harapan muluk untuk kemunculan kembali Soekarno sebagai pengubah permainan. Pada 3 Oktober 1965, ketika bertemu dengan delegasi Sekolah Staf Angkatan Udara Indonesia, Zhou Enlai mengatakan, ia menjadi sangat tenang mendengar ucapan Presiden Soekarno sendiri dalam suatu siaran jam 14.30 petang pada hari itu. Sebelum mengakhiri percakapan, Zhou mengatakan kepada ketua delegasi, "Mohon sampaikan kepada Presiden Soekarno untuk memelihara kesehatan, demi revolusi Indonesia."<sup>109</sup> Pada 4 Oktober, sebelum Chairul Saleh kembali ke Jakarta,

108 "Tentang Gerakan 30 September di Indonesia," 2 Oktober 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 204-01389-04.

109 "Catatan Pertemuan Perdana Menteri Zhou Enlai dengan Sekolah Staf AURI," 3 Oktober 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01687-02.

Zhou berpesan kepadanya untuk menyampaikan salam dari seluruh jajaran pimpinan PKT termasuk Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhu De, Chen Yi, dan dia sendiri kepada Soekarno. Zhou juga mengatakan, "kami semua di sini terus-menerus mengikuti kabar mengenai keadaan di Indonesia mulai dari tanggal 1 sampai 3 Oktober."<sup>110</sup>

Namun, isyarat persahabatan itu berbalik dengan tajam ketika konflik pecah antara anggota staf Kedutaan Besar Tiongkok dengan Angkatan Darat Indonesia di kompleks Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Perselisihan terjadi ketika pihak kedutaan tidak bersedia menurunkan benderanya menjadi setengah tiang dalam hari peringatan atas terbunuhnya keenam jenderal dalam peristiwa G30S. Pertengkaran dilanjutkan dengan penggeledahan atas asrama yang digunakan anggota staf kedutaan. Penggeledahan juga dilakukan terhadap para teknisi Tiongkok yang terlibat dalam pekerjaan membangun gedung untuk keperluan CONEFO (Conference of New Emerging Forces).<sup>111</sup> Di mata para pemimpin Tiongkok, kegagalan Soekarno untuk melindungi kepentingan Tiongkok pada saat yang begitu penting dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian. Itu juga, pada pendapat para pemimpin Tiongkok, mencerminkan fakta Soekarno tak bisa dipercaya dan menunjukkan ketidakmampuannya dalam situasi yang tengah berubah. Chen Yi mengatakan kepada Presiden Korea Utara yang tengah berkunjung ke Beijing pada pertengahan November:

*Soekarno ingin bertindak sebagai mediator dan mengatasi situasi, tetapi ruang dimana dia bisa memainkan peran sangat terbatas. Sejak 1955 sampai kini kami telah berkolaborasi dengan Soekarno lebih dari 10 tahun lamanya. Kebijakan*

110 "Catatan Pertemuan Kedua dan Ketiga dengan Delegasi MPR Indonesia (tentang Situasi Domestik di Indonesia dan Konferensi Asia-Afrika)," 1-4 Oktober 1965.

111 "Pemerintah Tiongkok Memprotes Keras Pelanggaran Protokol Diplomatik yang Dilakukan Angkatan Darat Indonesia, Renmin Ribao, 19 Oktober 1965.

*kami terhadap Soekarno telah memunculkan suasana yang baik di kalangan negara-negara Asia dan Afrika. Kami mengatakan kepadanya, dia bisa menggunakan serangan dan penggeledahan atas kantor perdagangan kami, tempat tinggal para teknisi kami (mengacu kepada para ahli bangunan Tiongkok yang dikirim ke Indonesia untuk membangun proyek gedung CONEFO) dan atas kantor konsulat kami sebagai kartu untuk berunding dengan Angkatan Darat dan golongan sayap kiri. Dia bisa memenangkan dukungan dari mereka. Dia harus berterima kasih untuk itu.*

Pada kesempatan yang sama Zhou Enlai juga mengatakan:

*Kami yakin Soekarno dan Subandrio mencurahkan perhatian pada terpeliharanya hubungan persahabatan dengan Tiongkok . . . tetapi sayap kanan mau merusak seluruh hubungan bilateral. Golongan etnis Tionghoa juga mengalami penganiayaan, sasaran perampokan dan penahanan yang melanggar hukum. Soekarno berharap kami memberinya waktu lebih. Namun, waktu telah berlalu. Dia hanya bisa menggelengkan kepala dan mengeluh . . . Sukar untuk mengatakan berapa banyak yang bisa dilakukannya. Saya kira dia tak punya lagi pengaruh.*

Seterusnya Zhou Enlai mengutip Raja Sihanouk, yang pada waktu itu dalam pengasingan di Beijing:

*Raja Sihanouk mengakui bahwa golongan kanan telah menguasai situasi di Indonesia walaupun mereka tak memiliki dasar dukungan di kalangan rakyat. Tapi Sihanouk kelewat mempercayai Soekarno. Menurut dia Soekarno akan mampu membalikkan keadaan. Itu tidak benar.<sup>112</sup>*

Sejak pertengahan November 1965, Beijing mulai merasa putus asa terhadap Soekarno dan mengharapkan

112 "Pertemuan Kedua antara Perdana Menteri Zhou Enlai dan Wakil Perdana Menteri Chen Yi dengan Wakil Perdana Menteri Korea Utara," 11 November 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 106-01476-06.

terjadinya revolusi komunis. Sikap itu disampaikan Chen Yi dengan terang-terangan dalam percakapan dengan Ri Ju-yeon. Katanya, "*Secara pribadi saya kira suatu hal yang baik kalau Soekarno digulingkan. Ia kemudian bisa menjadi perantara antara kiri dan kanan. Tapi, hari depan Indonesia tergantung pada perjuangan bersenjata yang dilakukan PKI. Ini merupakan hal yang sangat penting dan pasti.*"<sup>113</sup> Namun, pada waktu itu Beijing tak memiliki gambaran yang jelas mengenai keadaan di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera, di mana kekuatan komunis dipercaya sebagai kekuatan paling kuat dan dominan. Seluruh komunikasi langsung antara PKI dan PKT telah terputus. Beijing tidak dapat menerima informasi apa pun secara langsung dari PKI. Juga secara tak langsung melalui kedutaan besar Korea Utara dan Vietnam Utara di Jakarta. Ada para anggota PKI yang datang ke Beijing dari Jakarta. Namun, jumlah mereka tak banyak dan tak memiliki informasi akurat mengenai keadaan di luar Ibu Kota. Kepemimpinan Tiongkok tahu ada kekuatan bersenjata terdiri dari 10 ribu orang lebih di luar Jawa Tengah. Beijing juga yakin PKI telah membangun kekuatan dan memiliki peluang besar dalam berhadapan dengan Angkatan Darat. Karena, menurut keyakinan Beijing lagi, PKI memegang kontrol atas daerah pedesaan yang begitu luas dan wilayah pegunungan. Dengan keras Chen Yi menganjurkan dilancarkan perjuangannya bersenjata oleh PKI:

*PKI memiliki sikap yang pasti dan jelas dalam kampanye menentang imperialisme dan revisionisme. Partai itu pasti tahan uji. Jelas bahwa taktik front persatuan tak akan menguntungkannya. PKI harus memastikan diri untuk beralih ke perjuangan bersenjata . . . Revolusi besar-besaran adalah hal yang tak bisa dielakkan di Indonesia. Tindakan apa pun yang ditempuh Amerika dan kekuatan-kekuatan sayap kanan,*

<sup>113</sup> *Ibid.*

*apa pun tipuan yang akan dimainkan Soekarno, isu fundamental perlu diselesaikan. Dewasa ini Indonesia sedang berada di tengah mata topan dan di tengah revolusi besar.*"<sup>114</sup>

Dalam menghadapi perubahan radikal politik domestik di Indonesia dan hubungan bilateral antara kedua negara, Chen Yi dan Zhou Enlai memperlihatkan sikap berbeda. Pandangan itu diperlihatkan keduanya ketika berbincang-bincang dengan Perdana Menteri Korea Utara pada November 1965. Posisi Chen Yi lebih agresif. Ia mengemukakan bahwa Tiongkok tak akan bertindak sebagai perantara dalam perpolitikan di Indonesia. Chen Yi seterusnya mengatakan, "*Akan sangat menguntungkan bagi kita kalau duta besar kita diusir. Itu menunjukkan bahwa ada harapan untuk terjadinya revolusi di Indonesia. Saya berharap konflik antara sayap kanan dan sayap kiri meningkat.*"<sup>115</sup> Namun, Zhou Enlai bersikap lebih hati-hati dan lebih diplomatis. Ia membuat perbedaan yang jelas antara dua segi dari kebijakan Tiongkok: pada satu sisi hubungan antarnegara dan pada sisi lain sikap terhadap revolusi di Indonesia. Dalam masalah hubungan bilateral, Zhou mengatakan bahwa Beijing akan terus bekerja sama dengan Soekarno selama dia bersikap jujur. Namun, juga Zhou memprotes sikap golongan yang anti Tiongkok dan sayap kanan. Mengenai hubungan antarpantai komunis Zhou mengatakan,

*"Kami mendukung partai saudara kami [PKI], tetapi dukungan kami berada dalam batas yang pantas. Itu merupakan revolusi rakyat Indonesia di bawah pimpinan sayap kiri. Kami tidak dapat melangkahi mereka. Sampai sekarang PKI belum mengeluarkan pengumuman. Karenanya kami tak dapat berbicara atas nama PKI.*"<sup>116</sup>

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

Harapan kepemimpinan Tiongkok yang begitu besar dengan segera saja menjadi berantakan. Pada Desember 1965 ketika Mao mendapat tahu tentang kematian Aidit yang ditembak di Jawa Tengah oleh tentara Soeharto, ia menulis sebuah sajak:

*Di musim dingin dahan-dahan jarang berdiri di depan jen-  
delaku, tersenyum kepada ratusan bunga*

*Sayangnya senyuman itu menjadi layu ketika musim semi tiba*

*Tak perlu ada kesedihan untuk yang menjadi layu*

*Bagi setiap bunga ada musim untuk layu seperti juga ada  
musim untuk berkembang*

*Akan lebih banyak lagi bunga berkembang di tahun-tahun  
mendatang.<sup>117</sup>*

Puisi itu memperlihatkan keyakinan Mao akan kebangkitan kembali gerakan komunis di Indonesia. Namun, kemudian Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan dan pada waktu yang bersamaan Soeharto memperkuat genggamannya atas kekuasaan politik dengan cara membersihkan unsur komunis di Indonesia. Akibatnya hubungan bilateral merosot sampai ke tingkat paling rendah. Dalam musim semi 1966, Beijing mulai secara terbuka menyerang pemerintah Soeharto setelah kelompok yang disebutnya "mahasiswa sayap kanan" dan Angkatan Darat Indonesia menyerang Kedutaan Besar Tiongkok dalam bulan April. Radio Peking secara terus menerus menyiarkan protes keras yang ditujukan kepada pendengar di Indonesia. Namun, ironisnya langkah tersebut malahan memberikan peluang kepada tentara Indonesia

117 Mao, "Pusuanzi dao guoji gongchanzhuyi zhanshi aidit tongzhi," (Memperingati Kemerdekaan Aidit, Seorang Pejuang Komunis Internasional), Desember 1965, <http://cpc.people.com.cn/GB/69112/70190/70199/4763391.html>, Diakses pada 20 Juli 2008.

untuk memperkuat tuduhan bahwa Beijing terlibat dalam G30S.<sup>118</sup>

Pemerintah Soeharto juga menuduh Beijing masih mempertahankan hubungan dengan PKI setelah G30S meletus. Beijing dituding memberikan dukungan kepada para pelarian PKI secara rahasia. Benar, bahwa Beijing telah mengatur agar para pelarian PKI dan anggota organisasi yang berafiliasi dengan PKI yang kebetulan berada di Tiongkok bisa hidup normal dan menyediakan tempat untuk berteduh. Tindakan itu juga diterapkan kepada mereka yang kemudian datang dari luar negeri ke Tiongkok untuk mencari perlindungan. Ke dalam kelompok itu termasuk Yusuf Adjitorop dan anggota keluarga Aidit (anak perempuannya Ibarruri dan saudara laki-lakinya Asahan Sobron).<sup>119</sup> G30S terjadi pada waktu yang bersamaan dengan Hari Nasional Tiongkok. Karenanya ada sekitar 4.500 orang pengunjung dari Indonesia yang menjadi anggota berbagai delegasi (politik, ekonomi, militer, dan kebudayaan). Di Beijing saja ada tak kurang dari 28 kelompok yang jumlah seluruhnya hampir mencapai 500 orang. Seperti yang dikatakan oleh Zhou Enlai kepada Chairul Saleh, pada 30 September 1965 sebelum pembukaan resepsi nasional. Kata Zhou, "Malam ini Anda sekalian [para tamu Indonesia] akan menempati sebagian besar dari ruang pesta ini. Mestinya kami punya petugas berbahasa Indonesia yang menemani anda sekalian di setiap meja.<sup>120</sup> Setelah G30S pemerintah Tiongkok menjalankan kebijakan yang ramah terhadap para

118 "Awat Neo-Imperialisme Kuning," Angkatan Bersenjata, 25 April 1966. Tajuk Rencana ini menuduh RRT sebagai "kaum imperialis kuning baru" yang melakukan campur tangan dalam politik domestik Indonesia, terutama dengan menyebarkan laporan tak ramah dan menyakitkan hati lewat Kantor Berita Xinhua dan Radio Peking.

119 Ibarruri telah menulis tentang pengalamannya hidup di Tiongkok, dalam Ibarruri Putri Alam, Roman Biografis Putri Alam, Anak Sulung D. N. Aidit (Jakarta: Hasta Mitra, 2006). Untuk analisis tentang buku ini, lihat David T. Hill, "Writing Lives in Exile: Autobiographies of Indonesian Left Abroad," dalam *Locating Life Stories: Beyond East-West Binaries in (Auto)Biographical Studies*, ed. Maureen Perkins (Honolulu, HI: University of Hawaii Press, 2012), hlm. 215-36.

120 "Catatan Pertemuan Pertama Perdana Menteri Zhou Enlai dengan Delegasi MPR Indonesia (mengenai keadaan dalam negeri Indonesia dan Konferensi Asia-Afrika)," 1-4 Oktober 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01917-03.

pendatang dari Indonesia. Pada 4 Oktober 1965 Zhou Enlai mengatakan kepada delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), "tidak mudah mendapat pengangkutan yang nyaman dalam waktu yang begitu singkat ini buat sekian banyak orang. Kami bersedia untuk menerima siapa saja yang tidak dapat berangkat segera dan menyediakan kemudahan kepada mereka. Kalau anda ingin bepergian di Tiongkok, anda bebas untuk melakukannya. Kalau anda ingin meninggalkan Tiongkok, anda juga bebas untuk melakukan itu. Dalam kedua hal ini kami akan bersedia membantu."<sup>121</sup>

Di antara para pengunjung dari Indonesia, hanya sebagian kecil saja (sebagian besar terdiri dari para pejabat tinggi pemerintah) yang kembali pulang ke Indonesia setelah G30S. Sebagian besar tinggal di Tiongkok untuk jangka waktu cukup panjang. Pada 2 Oktober AURI mengirim sebuah pesawat dari Pangkalan Udara Halim ke Beijing untuk menjemput sebagian dari anggota delegasi itu.<sup>122</sup> Marsekal Muda Sutopo dan ilmuwan nuklir Djali Ahimsa terangkut dan mereka tiba kembali di Indonesia pada 6 Oktober.<sup>123</sup> Tapi pada waktu yang bersamaan anggota dan simpatisan PKI yang tidak dapat atau yang tak mau kembali ke Indonesia, segala keperluan mereka diurus oleh PKT. Menurut seorang penulis yang juga anggota PKI Utuy Tatang Sontani yang tinggal di Tiongkok pada 1965-1974, mereka yang kesehatannya terganggu dikirim ke beberapa rumah sakit di Guangzhou dan kemudian ke sebuah sanatorium di Tiongkok Selatan.<sup>124</sup>

121 "Catatan Pertemuan Kedua dan Ketiga Perdana Menteri Zhou Enlai dengan Delegasi MPR Indonesia (tentang situasi dalam negeri di Indonesia dan Konferensi Asia-Afrika)," 1-4 Oktober 1965, Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok, 105-01917-01.

122 "Catatan Pertemuan antara Perdana Menteri Zhou Enlai dengan Delegasi Sekolah Staf AURI," 3 Oktober 1965, *Arsip Kementerian Luar Negeri Tiongkok*, 105-01687-02.

123 Wawancara dengan Djali Ahimsa, Jakarta, 16 April 2013.

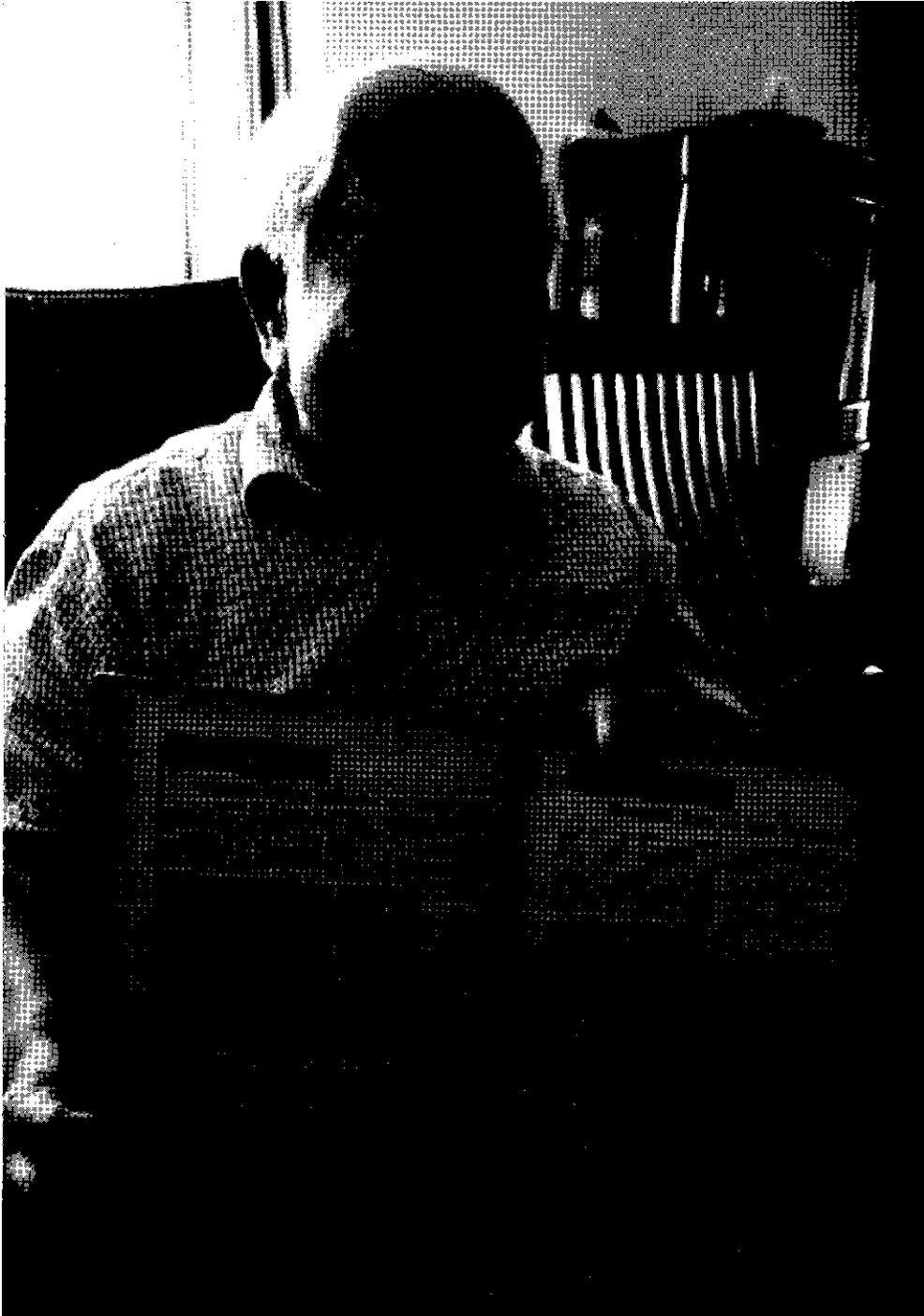
124 Utuy Tatang Sontani, *Di Bawah Langit tak Terbantang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2001), hal 77-104. Sanatorium di Tiongkok Selatan yang disebut Tatang boleh jadi sebuah *guesthouse*, diperuntukkan bagi para pelarian komunis dari Asia Tenggara, terletak di Nanchang, Propinsi Jiangxi. Wawancara dengan Suar Suroso, Nanchang, Tiongkok, 9 Oktober 2013. Suar Suroso, mantan Sekretaris organisasi pemuda PKI, Pemuda Rakyat, tiba di Beijing dari Moskow pada 1967. Cabang Internasional PKT yang mengatur agar Suroso dan keluarganya bisa tinggal di Nanchang.

Mereka yang sehat dan yang sembuh dan memutuskan buat tinggal dimasukkan ke Akademi Militer Nanjing. Di sana mereka dilatih dalam propaganda berkaitan dengan Revolusi Kebudayaan dan dipaksa menghadiri pertemuan-pertemuan. Dalam pertemuan-pertemuan itu pula mereka setiap hari dipaksa untuk menghadiri sesi kritik dan kritik diri berdasarkan pada karya-karya Mao Zedong.<sup>125</sup> Ada juga kabar yang menyatakan tentang adanya pelarian PKI yang mendapat latihan tentang teknik perang gerilya di Akademi Militer Nanjing itu.<sup>126</sup> Namun, sedikit sekali sumber tertulis yang mengonfirmasikan tentang adanya program pelatihan seperti itu. Juga tidak ada informasi tentang kapan latihan semacam itu mulai dan berakhir. Tampaknya pemerintah Tiongkok menghentikan latihan-latihan itu pada 1968 atau 1969. Itu barangkali terjadi ketika mulai kentara bahwa perjuangan bersenjata di Blitar Selatan dan Kalimantan berakhir dan para anggota PKI yang tersisa tercerai-berai.

Namun yang paling penting, selama Revolusi Kebudayaan berlangsung, para pencari suaka itu diberi instruksi untuk melakukan refleksi diri atas "kesalahan-kesalahan PKI" yang membawa partai itu ke G30S. Kesimpulan yang mereka tarik, yang barangkali dicoba untuk disesuaikan dengan suasana politik radikal di Tiongkok pada waktu itu, PKI telah menebarkan benih untuk kehancurannya sendiri. Alasannya, PKI telah membuat keputusan buat meninggalkan perjuangan bersenjata. Dengan menempuh jalan parlementer PKI memang telah meraup sukses besar. Akan tetapi, itu

125 *Ibid*, hal 91-97. Utuy tidak menyebut secara eksplisit "Akademi Militer Nanjing" tapi ia menulis kota itu dikenal di bawah julukan "tungku" Tiongkok (nama panggilan populer buat Kota Nanjing.) Tentang tempat yang dijaga militer dengan hampir semua orang Indonesia berpakaian militer, besar kemungkinan yang dimaksud adalah Akademi Militer Nanjing. Perkiraan ini diperkuat oleh wawancara dengan Adam Wong (Wang Jinming), Hong Kong, 16 September 2013.

126 Wawancara dengan Adam Wong. Ia adalah salah satu dari 41 pemuda etnis Tionghoa yang terlibat dalam konflik dengan tentara dan polisi setempat di Medan. Pada awal 1967 dia bersama beberapa "pahlawan hoakiao kecil" lainnya memberikan ceramah dengan berkeliling Tiongkok (dengan diatur oleh Cabang Internasional PKT), termasuk di Akademi Militer Nanjing.



Mantan anggota PKI, Suar Suroso, membawa gambar dirinya dan Kim Il Sung, di Nanchang, Provinsi Jiangxi, Oktober 2013. (Foto: Faomo Zhuo)

dianggap sebagai revisionis dan pilihan yang sangat fatal.<sup>127</sup> Adam Wong (Wang Jinming), seorang yang berlatar belakang etnis Tionghoa yang pulang dari Medan ke Tiongkok pada 1966, berkunjung ke Akademi militer pada awal 1967. Menurut penuturannya, ada sekitar 100 orang anggota PKI tinggal di sana. Hampir semua ingin tahu tentang keadaan di Indonesia dan mengajukan "pertanyaan-pertanyaan yang tak putus-putusnya" mengenai pembersihan atas PKI. Menurut pengamatan Wong, para pelarian itu tersedot ke dalam Revolusi Kebudayaan dan terpecah-pecah menjadi faksi-faksi politik yang saling bertentangan. Ada yang masih loyal kepada Aidit, dan ada yang menentang Aidit. Alasannya, pimpinan PKI telah terjerumus ke dalam pendapat mengenai "sifat revisionis" dari jalan parlementer. Atau lantaran mereka menyalahkan kecerobohan Aidit untuk kehancuran PKI. Mereka mengikuti seruan untuk "berbicara dengan bebas" dan "menyampaikan pendapat dengan sepenuh hati." Atas dasar kedua slogan itu, kedua pihak memasang "poster huruf besar" dan saling berdebat dengan sangat seru.<sup>128</sup>

Pemerintah Tiongkok mengubah kebijakannya terhadap para pelarian PKI itu pada akhir 1980-an ketika Beijing berusaha untuk menormalkan hubungan dengan Jakarta. Status resmi yang diberikan kepada mereka diturunkan dari "tamunya partai"—posisi pretisius dalam konteks Tiongkok—menjadi "penduduk berasal dari tanah asing." Mereka yang hidup di Tiongkok mendapat paspor Tiongkok, kartu penduduk nasional, dan dipekerjakan pada sektor-sektor sipil.<sup>129</sup> Pada 1989 Qian Qichen, menteri luar negeri pada waktu itu, bertemu dengan Menteri Negara Murdiono

127. Utuy Tatang Sontani, *Di Bawah Langit tak Terbintang*, hlm. 94.

128. Wawancara dengan Adam Wong.

129. Wawancara dengan Suar Suroso, Nanchang, Tiongkok, 10 dan 12 Oktober 2012. Setelah Revolusi Kebudayaan berakhir, Suroso diberi pekerjaan untuk mengajar di universitas setempat. Istrinya yang pernah mendapat pelatihan dalam pengobatan, bekerja di rumah sakit lokal.

dalam percakapan pencair kebekuan suasana. Qian menerangkan tentang posisi Tiongkok dengan cara berikut:

*Kami memperhatikan bahwa Indonesia sangat menaruh perhatian pada konsep tidak melakukan campur-tangan dalam masalah internal setiap negara. Saya menekankan bahwa Tiongkok tidak punya hubungan dengan PKI. Kami malahan tak tahu kalau partai semacam itu sekarang masih ada. Pada suatu waktu ada beberapa orang Indonesia tinggal di Tiongkok, tapi kebanyakan telah pergi dan sekarang ada sekumpulan kecil yang masih tinggal di Tiongkok. Sebagian dari mereka telah pensiun dan yang lain masih punya pekerjaan. Kami tak mengizinkan orang-orang Indonesia yang tinggal di Tiongkok untuk melibatkan diri dalam aktivitas politik.<sup>130</sup>*

## Kesimpulan

Sejak akhir 1964 sampai September 1965 Beijing memanfaatkan sebagian besar dari pengaruhnya untuk mendorong terciptanya suatu skenario yang sejalan dengan kepentingannya. Baginya itu berarti hadirnya suatu pemerintahan kuat di Indonesia yang dipimpin Soekarno dan PKI, sedangkan sayap kanan dilemahkan atau malahan di lenyapkan. Untuk itu Tiongkok menawarkan bantuan militer dan janji untuk adanya transfer teknologi nuklir. Dengan cara itu, Tiongkok berharap untuk dapat memanfaatkan Konfrontasi Soekarno melawan Malaysia dan keinginan besarnya untuk memiliki senjata nuklir. Tujuan utama kepemimpinan Beijing adalah untuk menggalang dukungan Soekarno dalam usaha untuk melemahkan pengaruh Barat di Asia Tenggara dan Pasifik. Beijing mendukung usul pembentukan Angkatan ke-5 untuk menopang kekuatan pro Soekarno (PKI dan Angkatan Udara) dalam menentang elemen "sayap kanan" dalam Angkatan Darat. Dan dengan

<sup>130</sup> Qian Qichen, *Ten Episodes in Chinese Diplomacy*, (New, NY: Harper Collins, 2005), hlm. 93-94

menawarkan bantuan medis kepada presiden, Beijing akan dapat memonitor kesehatan Soekarno. Alasannya, kondisi kesehatan Soekarno menjadi hal yang sangat dipolitisasi sebelum G30S. Dengan demikian, Beijing akan mampu memberikan keterangan tentang perkembangan terkini kepada PKI pada waktu yang tepat dan dengan informasi yang akurat. Beijing memang telah terlebih dahulu diberitahu mengenai rencana rahasia Aidit untuk G30S dan besar kemungkinan memberikan restunya. Setelah adanya akibat buruk dari gerakan itu dan selama Revolusi Kebudayaan berlangsung, PKT memberikan tempat berlindung dan menjamin kehidupan para pelarian PKI.

Namun, pengaruh Tiongkok atas perkembangan politik Indonesia pada 1965 sangatlah terbatas. Senjata-senjata ringan yang ditawarkan para pemimpin Tiongkok untuk pembentukan Angkatan ke-5 belum sampai ke Indonesia sebelum G30S terjadi. Rencana transfer materi dan teknologi nuklir terputus karena G30S dan tidak terealisasi. Penyakit Soekarno tetap ada, tetapi tak kritis, dan tidak menjadi pemicu langsung terjadinya G30S. Sejak akhir 1964 sampai awal 1965, Aidit mungkin saja sedang menyusun sebuah skenario politik Indonesia tanpa Soekarno. Namun, bisa saja dalam waktu singkat sebelum G30S telah timbul beberapa pertimbangan, dan bukan makin dekatnya kematian Soekarno, telah mendorong Aidit untuk beraksi. Yang juga paling utama Mao bukanlah "arsitek perebutan kekuasaan." Suatu kelompok terselubung di dalam PKI telah menyusun rencananya dan Aidit berbagi informasi tentang itu dengan para pemimpin Tiongkok. Rencana tersebut dilaksanakan pada waktu yang untuk Beijing sendiri merupakan suatu kejutan. Yang terakhir tapi juga penting, sebagian besar para pelarian PKI yang menetap di Tiongkok telah tertelan oleh kampanye politik di RRT ketika Revolusi Kebudayaan tengah

berlangsung. Karenanya tak mungkin kalau mereka telah kembali ke Indonesia dan bergabung dengan sisa-sisa PKI yang melancarkan perjuangan bersenjata. ❖

2

## HUBUNGAN TIONGKOK-TAIWAN- INDONESIA PASCA G30S

Baba Kimihiko

### **Pendahuluan : Dampak G30S**

Tentang penyebab G30S, pendapat resmi dari pemerintah Indonesia sampai sekarang tidak berubah, yaitu G30S dipimpin oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan dukungan dari Partai Komunis Tiongkok, dan dilakukan oleh anggota sayap kiri dalam Angkatan Darat [Nugroho, 1968]. Untuk membuktikan pernyataan itu, sangat diperlukan bahan-bahan arsip dari Tiongkok, tetapi sangat sedikit dokumen yang diumumkan. Pengecualian adalah karya Zhou Taomo yang menyelidiki masalah ini dengan memakai bahan arsip kementerian luar negeri Tiongkok yang terbuka pada saat tertentu (sekarang tertutup lagi). Hasil penelitiannya membuktikan keterlibatan Partai Komunis Tiongkok dalam G30S [Taomo 2014].

Menurut Zhou, pada 5 Agustus 1965 sudah dinyatakan kemungkinan kudeta sayap kiri oleh Aidit yang saat itu berada di Beijing, dan wakil ketua PKI di Beijing, Yusuf